BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (AUDITED)

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

Jalan Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta Pusat 10110

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan periode yang berakhir per 31 Desember 2019 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2020

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SUGIHARDJO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 5 JAKARTA PUSAT 10110
TELP. 021-34832949 FAX. 021-384 7480 / 021- 348 32949

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pengembangan SDM Perhubungan tingkat Eselon I selaku UAPPA E-1 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing satuan kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SUGIHARDJO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2019 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara periode per 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.254.213.513.569,- atau mencapai 107,87 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp1.162.733.037.000,-.

Realisasi Belanja Negara periode per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.709.814.424.483,- atau mencapai 95,24 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.895.229.045.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana periode per 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.303.009.289.546,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp785.820.841.658,-, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp17.276.659.287.906,-, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp158.000.000,-, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp240.371.159.982,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp63.234.018.002,- yang hanya terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek. Dan nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp18.239.775.271.544,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, suplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.233.192.128.724,- sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp4.496.590.308.653,- sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar minus Rp3.263.398.179.929,-. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp7.983.754.787,- dan Defisit Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar minus Rp3.255.414.425.142,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp19.226.042.314.130,- dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp3.255.414.425.142,- dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp253.930.882.819,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.523.078.265.375,- sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp18.239.775.271.544,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019		% thd	31 DESEMBER 2018
		ANGGARAN	REALISASI	Anggaran	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	1.162.733.037.000	1.254.213.513.569	107,87	1.064.104.121.561
JUMLAH PENDAPATAN		**1.162.733.037.000**	**1.254.213.513.569**	**107,87**	**1.064.104.121.561**
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	326.272.516.000	318.305.565.015	97,56	306.383.777.196
Belanja Barang	B.3	3.270.231.105.000	3.098.220.666.873	94,74	2.725.620.585.848
Belanja Modal	B.4	298.725.424.000	293.288.192.595	98,18	925.586.092.319
JUMLAH BELANJA		**3.895.229.045.000**	**3.709.814.424.483**	**95,24**	**3.957.590.455.363**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	Rp	-	Rp	45,000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	Rp	8,905,591	Rp	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	Rp	30,258,968,812	Rp	33,529,646,159
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	Rp	623,527,400,175	Rp	565,764,768,464
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	C.5	Rp	10,000,000,000	Rp	-
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.6	Rp	201,366,035	Rp	256,863,396
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.7	Rp	120,590,278	Rp	250,064,518
Piutang Bukan Pajak	C.8	Rp	8,005,205,425	Rp	7,524,117,324
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.9	Rp	(6,159,843,503)	Rp	(6,134,224,034)
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.10	Rp	20,196,447,422	Rp	29,685,055,858
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.11	Rp	(1,622,698,376)	Rp	(2,379,182,876)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.12	Rp	1,634,577,549	Rp	863,172,748
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.13	Rp	(12,288,713)	Rp	(6,792,215)
Persediaan	C.14	Rp	99,662,210,963	Rp	89,746,565,729
Jumlah Aset Lancar		**Rp**	**785,820,841,658**	**Rp**	**719,100,100,071**
ASET TETAP					
Tanah	C.15	Rp	7,703,080,421,347	Rp	7,838,980,888,847
Peralatan dan Mesin	C.16	Rp	8,879,557,449,152	Rp	8,727,991,066,406
Gedung dan Bangunan	C.17	Rp	5,191,697,362,651	Rp	5,631,491,050,347
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.18	Rp	1,766,793,499,845	Rp	1,154,775,234,038
Aset Tetap Lainnya	C.19	Rp	145,967,879,917	Rp	145,317,933,721
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.20	Rp	11,249,143,550	Rp	24,611,209,399
Akumulasi Penyusutan	C.21	Rp	(6,421,686,468,556)	Rp	(5,202,372,488,847)
Jumlah Aset Tetap		**Rp**	**17,276,659,287,906**	**Rp**	**18,320,794,893,911**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.22	Rp	158.000.000	Rp	**184.000.000**
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**Rp**	**158.000.000**	**Rp**	**184.000.000**
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.23	Rp	311.337.186.814	Rp	317.073.966.332
Aset Lain-lain	C.24	Rp	171.535.461.698	Rp	115.211.348.758
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.25	Rp	(242.501.488.530)	Rp	(182.574.796.909)
Jumlah Aset Lainnya		**Rp**	**240.371.159.982**	**Rp**	**249.710.518.181**
JUMLAH ASET		**Rp**	**18.303.009.289.546**	**Rp**	**19.289.789.512.163**
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.26	Rp	44.769.163.517	Rp	35.740.993.336
Pendapatan Diterima Dimuka	C.27	Rp	18.464.854.485	Rp	28.004.378.397
Uang Muka dari KPPN	C.28	Rp	-	Rp	45.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	Rp	-	Rp	1.781.300
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**Rp**	**63.234.018.002**	**Rp**	**63.747.198.033**
JUMLAH KEWAJIBAN		**Rp**	**63.234.018.002**	**Rp**	**63.747.198.033**
EKUITAS					
Ekuitas	C.30	Rp	18.239.775.271.544	Rp	19.226.042.314.130
JUMLAH EKUITAS DANA		**Rp**	**18.239.775.271.544**	**Rp**	**19.226.042.314.130**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**Rp**	**18.303.009.289.546**	**Rp**	**19.289.789.512.163**

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-19	31-Dec-18
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam			
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D1.	1.233.192.128.724	1.034.474.809.208
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		1.233.192.128.724	1.034.474.809.208
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah		-	-
Jumlah Pendapatan Hibah		-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.233.192.128.724	1.034.474.809.208
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D2.	699.935.518.392	619.918.388.263
Beban Persediaan	D3.	152.632.753.721	131.083.050.821
Beban Barang dan Jasa	D4.	1.751.437.539.143	1.633.596.653.063
Beban Pemeliharaan	D5.	345.349.805.250	264.269.472.806
Beban Perjalanan Dinas	D6.	461.282.949.516	382.736.499.289
Beban Barang Untuk Diserahkan pada Masyarakat			
Beban Bantuan Sosial			
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D7.	1.086.677.111.164	989.660.081.181
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D8.	-725.368.533	5.843.298.816
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		4.496.590.308.653	4.027.107.444.239
SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.263.398.179.929)	(2.992.632.635.031)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		4.845.584.596	3.931.718.603
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		7.036.550.183	2.697.207.596
Jumlah Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(2.190.965.587)**	**1.234.511.007**
SURPLUS (DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Jumlah Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	**D9.**		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		19.339.647.390	36.835.188.345
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		9.164.927.016	6.653.306.784
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**10.174.720.374**	**30.181.881.561**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**7.983.754.787**	**31.416.392.568**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(3.255.414.425.142)**	**(2.961.216.242.463)**
POS LUAR BIASA	**D10.**		
Beban Luar Biasa			
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		**(3.255.414.425.142)**	**(2.961.216.242.463)**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rp)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
(1)		(2)	(3)
EKUITAS AWAL	E.1	**19,226,042,314,130**	**18,754,118,760,556**
SURPLUS / DEFISIT - LO	E.2	**(3,255,414,425,142)**	**(2,961,216,242,463)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI	E.3	**(253,930,882,819)**	**575,352,898,265**
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK			
KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI			
/KESALAHAN MENDASAR			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	378,315,377
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.3	93,716,328,880	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.4	(110,573,423,333)	575,318,154,116
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.5	(241,393,380,366)	9,270,921,239
Koreksi lain-lain	E.3.6	4,319,592,000	(9,614,492,467)
TRANSAKSI ANTARA ENTITAS	E.4	**2,523,078,265,375**	**2,857,786,897,772**
Diterima dari Entitas Lain	E.4.1	(44,301,972,964)	(48,560,782,286)
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.2	2,567,665,515,589	2,887,864,285,728
Transfer Masuk	E.4.3	49,555,598,691	680,183,205,508
Transfer Keluar	E.4.4	(49,840,875,941)	(679,771,255,508)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.5	-	18,071,444,330
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**-986,267,042,586**	**471,923,553,574**
EKUITAS AKHIR	E.5	**18,239,775,271,544**	**19,226,042,314,130**

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Tugas Pokok melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan dan mempunyai fungsi :

1. Penyusun Kebijakan Teknis, Rencana dan Program Pengembangan Sumber Daya di Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan;
3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan Administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Berdasarkan Tinjau Ulang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan merumuskan Sasaran Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yaitu Terpenuhinya SDM Transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Arah Kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang transportasi. Strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan :

1. Menyusun *Man Power Planning* SDM Transportasi;
2. Menyusun *Trainning Needs Analysis (TNA)* SDM Transportasi;
3. Mengembangkan Kapasitas Diklat SDM Transportasi;
4. Menata Regulasi Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi;
5. Meningkatkan Tata Kelola Diklat dan Kualitas Lulusan;
6. Meningkatkan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Tahun 2015

Badan Pengembangan SDM Perhubungan mulai Tahun Anggaran 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Interprestasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) No 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Badan Pengembangan SDM Perhubungan tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.
2. Badan Pengembangan SDM Perhubungan menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
3. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2018 adalah laporan keuangan komparatif.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Badan Pengembangan SDM Perhubungan menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Akuntansi dan pelaporan berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dasar Pengukuran

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2019 BPSDM Perhubungan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapaan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara

jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*. Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
b. Gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali barang milik Negara/Daerah dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK,06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali barang milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan jembatan dan bangunan air pada kementrian Negara/lembaga sesuai kodefikasi barang milik Negara yang diperoleh sampai dengan per 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementrian/lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh penilai pemerintah di lingkungan direktorat jenderal kekayaan Negara, kementrian keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selaian tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan

keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaanya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp 1.254.213.513.569,-

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.254.213.513.569,- atau mencapai 107,87 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.162.733.037.000,-. Pendapatan Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha, Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan teknologi, Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-lain serta merupakan Pendapatan Badan Layanan Umum yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum, Pendapatan Hasil Kerjasama BLU, Pendapatan dari Alokasi APBN, dan Pendapatan BLU lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019

Uraian	31 DESEMBER 2019				
	Anggaran		Realisasi		% Real Angg.
PNBP LAINNYA	Rp	-	Rp	-	-
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	Rp	-	Rp	-	-
Pendapatan Jasa	Rp	19.156.937.000	Rp	-	-
Pendapatan Pendidikan	Rp	27.305.856.000	Rp	-	-
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	Rp	3.700.500.000	Rp	8.950.617.212	241,88
Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi	Rp	127.595.201.000	Rp	30.510.517.228	23,91
Pendapatan Jasa Lainnya	Rp	-	Rp	-	-
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan	Rp	-	Rp	24.251.232	100,00
Pendapatan Denda	Rp	-	Rp	208.320.792	100,00
Pendapatan Lain-lain	Rp	-	Rp	4.608.266.500	100,00
	Rp	-	Rp	-	-
PENDAPATAN BLU	Rp	-	Rp	-	-
Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp	916.279.485.000	Rp	1.032.396.916.684	112,67
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	Rp	57.739.852.000	Rp	96.801.373.101	167,65
Pendapatan Dari Alokasi APBN	Rp	-	Rp	29.829.112.028	100,00
Pendapatan BLU Lainnya	Rp	10.955.206.000	Rp	50.884.138.792	464,47
Jumlah	**Rp**	**1.162.733.037.000**	**Rp**	**1.254.213.513.569**	**107,87**

Realisasi PNBP Lainnya Badan Pengembangan SDM Phb sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 8,77 persen jika dibandingkan dengan Realisasi PNBP Lainnya per 31 Desember 2018. Sedangkan pada Realisasi Pendapatan BLU Badan Pengembangan SDM Phb sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 19,14 persen jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan BLU per 31 Desember 2018.

Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2019		REALISASI 31 DESEMBER 2018		NAIK (TURUN) %
PNBP LAINNYA	**Rp**	**44.301.972.964**	**Rp**	**48.560.782.286**	**(8,77)**
Pendapatan Jasa	Rp	-	Rp	-	-
Pendapatan Pendidikan	Rp	-	Rp	-	-
Pendapatan Iuran dan Denda	Rp	-	Rp	-	-
Pendapatan Lain-lain	Rp	-	Rp	-	-
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	Rp	8.950.617.212	Rp	4.353.206.603	105,61
Pendapatan Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi	Rp	30.510.517.228	Rp	15.384.180.913	98,32
Pendapatan Jasa Lainnya	Rp	-	Rp	271.150	(100,00)
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan	Rp	24.251.232	Rp	2.561.237	846,86
Pendapatan Denda	Rp	208.320.792	Rp	6.745.728.519	(96,91)
Pendapatan Lain-lain	Rp	4.608.266.500	Rp	22.074.833.864	(79,12)
PENDAPATAN BLU	**Rp**	**1.209.911.540.605**	**Rp**	**1.015.543.339.275**	**19,14**
Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp	1.032.396.916.684	Rp	828.745.597.119	24,57
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	Rp	96.801.373.101	Rp	104.324.999.439	(7,21)
Pendapatan Dari Alokasi APBN	Rp	29.829.112.028	Rp	38.299.096.813	(22,12)
Pendapatan BLU Lainnya	Rp	50.884.138.792	Rp	44.173.645.904	15,19
Jumlah	**Rp**	**1.254.213.513.569**	**Rp**	**1.064.104.121.561**	**17,87**

Terdapat perbedaan senilai Rp3.163.847.141,- antara realisasi pendapatan pada LRA senilai Rp1.254.213.513.569,- dan total pendapatan pada Laporan Operasional dan Non Operasional senilai Rp1.257.377.360.710,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

AKUN	LRA	LO	SELISIH
424112	1,019,645,169,061	1,010,582,039,077	9,063,129,984
424113	10,145,219,471	12,660,769,471	- 2,515,550,000
424118	631,516,000	631,516,000	-
424119	1,975,012,152	1,975,012,152	-
424212	-	993,000,000	- 993,000,000
424242	-	3,080,427,000	- 3,080,427,000
424311	36,325,000	36,325,000	-
424312	96,765,048,101	87,948,315,397	8,816,732,704
424313	-	267,738,280	- 267,738,280
424421	18,583,497,828	18,583,497,828	-
424422	11,245,614,200	11,245,614,200	-
424911	28,401,986,654	28,399,144,807	2,841,847
424915	138,775,398	5,545,641	133,229,757
424919	8,357,515,198	8,342,236,998	15,278,200
424921	848,217,900	294,010,503	554,207,397
424922	2,820,742,146	2,789,057,034	31,685,112
424923	4,770,060,496	4,742,649,259	27,411,237
424924	2,586,991,000	2,608,221,000	- 21,230,000
424925	2,944,500,000	2,944,500,000	-
424929	15,350,000	15,350,000	-
425122	711,190,445	711,190,445	-
425129	4,134,394,151	4,134,394,151	-
425131	274,142,616	284,774,407	- 10,631,791
425151	3,830,890,000	3,830,890,000	-
425411	940,800,000	940,800,000	-
425412	3,575,005,000	3,575,005,000	-
425419	265,700,000	265,700,000	-
425421	13,213,192,000	13,213,192,000	-
425429	12,515,820,228	12,515,820,228	-
425764	251,232	251,232	-
425791	24,000,000	24,000,000	-
425811	208,320,792	425,429,405	- 217,108,613
425911	85,130,476	85,130,476	-
425912	890,742,094	393,430,477	497,311,617
425913	3,631,551,484	2,427,827,817	1,203,723,667
425999	842,446	842,446	-
491429	-	208,774,676	- 208,774,676
491511	-	16,194,938,303	- 16,194,938,303
TOTAL	**1,254,213,513,569**	**1,257,377,360,710**	**- 3,163,847,141**

Realisasi Belanja Negara Rp 3.709.814.424.483,-

BELANJA

Realisasi Belanja Badan Pengembangan SDM Phb pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.709.814.424.483,- atau 95,24 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.895.229.045.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2019

adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019

URAIAN	31 DESEMBER 2019				
	ANGGARAN		REALISASI		% REAL. ANGGARAN
Belanja Pegawai	Rp	326.272.516.000	Rp	318.458.528.851	97,61
Belanja Barang	Rp	3.270.231.105.000	Rp	3.099.916.888.219	94,79
Belanja Modal	Rp	298.725.424.000	Rp	293.496.954.355	98,25
Total Belanja Kotor	**Rp**	**3.895.229.045.000**	**Rp**	**3.711.872.371.425**	**95,29**
Pengembalian Belanja	Rp	-	Rp	2.057.946.942	-
Jumlah	Rp	3.895.229.045.000	Rp	3.709.814.424.483	**95,24**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

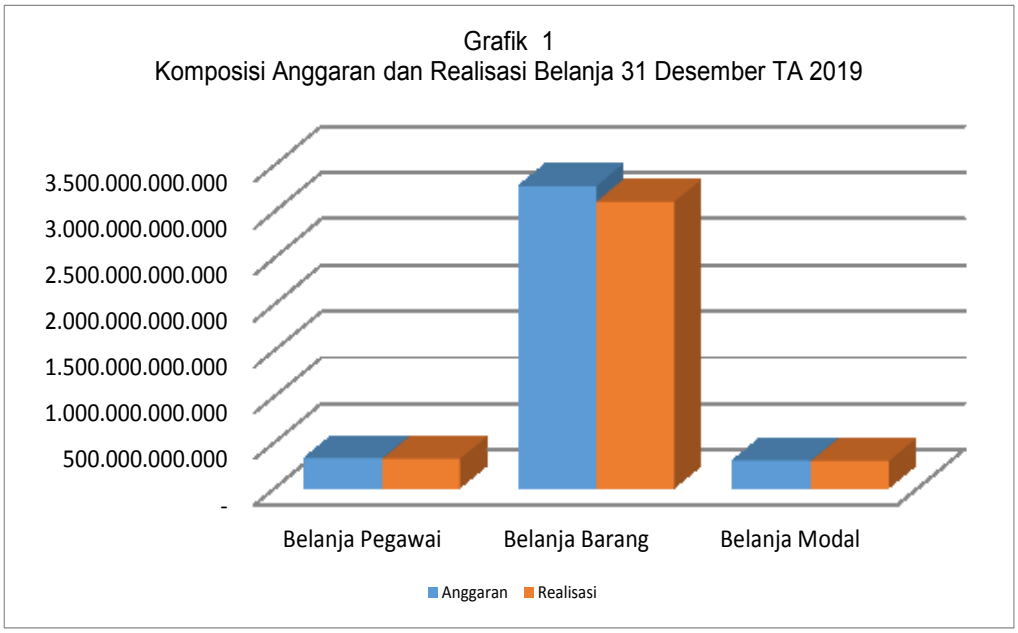

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 6,26 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2019		REALISASI 31 DESEMBER 2018		NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp	318.305.565.015	Rp	306.383.777.196	3,89
Belanja Barang	Rp	3.098.220.666.873	Rp	2.725.620.585.848	13,67
Belanja Modal	Rp	293.288.192.595	Rp	925.586.092.319	(68,31)
Jumlah	**Rp**	**3.709.814.424.483**	**Rp**	**3.957.590.455.363**	**(6,26)**

Belanja Pegawai Rp 318.305.565.015,-

B.2. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp318.305.565.015,- dan Rp306.383.777.196,-. Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,89 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2019		REALISASI 31 DESEMBER 2018		NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp	131.044.469.845	Rp	121.963.825.584	7,45
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp	2.157.616	Rp	1.795.281	20,18
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp	10.148.037.804	Rp	9.563.911.530	6,11
Belanja Tunj. Anak PNS	Rp	2.826.264.694	Rp	2.624.296.484	7,70
Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp	2.641.735.000	Rp	2.500.225.888	5,66
Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp	6.414.622.000	Rp	6.337.221.220	1,22
Belanja Tunj. PPh PNS	Rp	385.465.500	Rp	280.632.649	37,36
Belanja Tunj. Beras PNS	Rp	6.772.388.240	Rp	6.607.159.730	2,50
Belanja Uang Makan PNS	Rp	18.055.166.574	Rp	17.314.013.717	4,28
Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	Rp	449.070.000	Rp	338.835.000	32,53
Belanja Tunj. Umum PNS	Rp	4.826.160.000	Rp	4.578.419.784	5,41
Belanja Tunj. Profesi Dosen	Rp	9.528.226.300	Rp	9.630.687.100	(1,06)
Belanja Uang Honor Tetap	Rp	-	Rp	-	-
Belanja Uang Lembur	Rp	7.007.661.732	Rp	10.544.727.500	(33,54)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	Rp	118.357.103.546	Rp	114.228.553.450	3,61
Pengembalian	Rp	(152.963.836)	Rp	(130.527.721)	17,19
Jumlah Belanja	**Rp**	**318.305.565.015**	**Rp**	**306.383.777.196**	**3,89**

Terdapat selisih belanja pegawai pada LRA dengan beban pegawai pada Laporan Operasional dikarenakan pengakuan beban remunerasi satker BLU pada LRA dicatat pada Belanja Barang sedangkan di Laporan Operasional dicatat pada beban pegawai.

Belanja Barang Rp 3.098.220.666.873,-

B.3. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.098.220.666.873,- dan Rp2.725.620.585.848,-. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 13,67 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2019		REALISASI 31 DESEMBER 2018		NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	Rp	211.269.684.613	Rp	219.975.032.305	(3,96)
Belanja Barang Non Operasional	Rp	815.639.060.362	Rp	767.124.887.432	6,32
Belanja Barang Persediaan	Rp	98.921.187.305	Rp	74.786.126.752	32,27
Belanja Jasa	Rp	147.935.740.482	Rp	103.780.533.300	42,55
Belanja Pemeliharaan	Rp	321.205.193.680	Rp	252.854.039.523	27,03
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	416.500.993.529	Rp	343.555.870.602	21,23
Belanja Barang BLU	Rp	1.088.445.028.248	Rp	963.983.433.092	12,91
Jumlah Belanja Kotor	**Rp**	**3.099.916.888.219**	**Rp**	**2.726.059.923.006**	**13,71**
Pengembalian Belanja	Rp	(1.696.221.346)	Rp	(439.337.158)	286,09
Jumlah Belanja Bersih	**Rp**	**3.098.220.666.873**	**Rp**	**2.725.620.585.848**	**13,67**

Belanja Gaji dan Tunjangan (remunerasi BLU) merupakan bagian dari Belanja Barang BLU pada LRA, namun diakui sebagai Beban Pegawai pada Laporan Operasional.

Belanja Modal Rp 293.288.192.595,-

B.4. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp293.288.192.595,- dan Rp925.586.092.319,-. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 68,31 persen dari Realisasi Belanja Modal per Desember 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2019		REALISASI 31 DESEMBER 2018		NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	Rp	3.682.731.000	Rp	98.858.000	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	73.393.461.701	Rp	446.590.121.100	(83,57)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	154.509.303.180	Rp	286.166.751.261	(46,01)
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	1.944.216.428	Rp	79.831.291.965	(97,56)
Belanja Modal Lainnya	Rp	6.128.841.300	Rp	7.149.161.450	(14,27)
Belanja Modal BLU	Rp	53.838.400.746	Rp	105.760.016.543	(49,09)
Jumlah Belanja Kotor	**Rp**	**293.496.954.355**	**Rp**	**925.596.200.319**	**(68,29)**
Pengembalian Belanja Modal	Rp	(208.761.760)	Rp	(10.108.000)	1.965,31
Jumlah Belanja Bersih	**Rp**	**293.288.192.595**	**Rp**	**925.586.092.319**	**(68,31)**

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar Rp785.820.841.658,-

Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp785.820.841.658,- dan Rp719.100.100.071,-. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut :

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Aset Lancar	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	45,000
2	Kas di Bendahara Penerimaan	8,905,591	-
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	30,258,968,812	33,529,646,159
4	Kas pada Badan Layanan Umum	623,527,400,175	565,764,768,464
5	Investasi Jangka Pendek-BLU	10,000,000,000	-
6	Belanja Dibayar di Muka	201,366,035	256,863,396
7	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	120,590,278	250,064,518
8	Piutang Bukan Pajak	8,005,205,425	7,524,117,324
9	Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang Bukan Pajak	(6,159,843,503)	(6,134,224,034)
10	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	20,196,447,422	29,685,055,858
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1,622,698,376)	(2,379,182,876)
12	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	1,634,577,549	863,172,748
13	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(12,288,713)	(6,792,215)
14	Persediaan	99,662,210,963	89,746,565,729
	Jumlah	**785,820,841,658**	**719,100,100,071**

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,-

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp45.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Pada akhir periode 31 Desember 2018 masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp45.000,- pada satker BP2TD Mempawah yang telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara tanggal 15 Januari 2019 dengan nomor NTPN : OBC35466CFGB2KPP.

Kas di Bendahara Penerimaan Rp8.905.591,-

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.905.591,- dan Rp0,- yang terdapat pada satker BPPTD Mempawah merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal penerimaan negara yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas tersebut telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 24 Januari 2020 dengan NTPN 2E7E948VU9625B78 senilai Rp8.905.000,- dan C5C9261QTUD8BLUDU senilai Rp591,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp30.258.968.812,-

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp30.258.968.812,- dan Rp33.529.646.159,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

NO	SATKER	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	API BANYUWANGI	4.810.616.512	3.480.436.300
2	PIP MAKASSAR	8.146.569.597	6.509.313.939
3	PPI CURUG	997.776.600	968.656.500
4	PIP SEMARANG	264.655.000	392.563.980
5	BPPTL JAKARTA	876.343.787	369.732.479
6	POLTEKPEL BAROMBONG	5.146.713.392	10.036.836.161
7	POLTEKPEL SORONG	2.315.149.834	2.053.991.250
8	POLTEKPEL MALAHAYATI	946.899.108	129.473.766
9	POLTEKBANG SURABAYA	-	4.138.172
10	POLTEKBANG MAKASSAR	65.111.003	
11	POLTEKPEL SURABAYA	323.041.500	111.869.000
12	POLTRADA BALI	-	106.191.000
13	POLTEKPEL BANTEN	6.366.092.479	9.366.443.612
TOTAL		**30.258.968.812**	**33.529.646.159**

Penjelasan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	SATKER	31 DESEMBER 2019	PENJELASAN
1	API BANYUWANGI	4,810,616,512	Saldo di rekening dana kelola
2	PIP MAKASSAR	8,146,569,597	Merupakan Uang Pendaftaran Pendidikan/Diklat yang belum ada penetapan menjadi peserta diklat
3	PPI CURUG	997,776,600	Saldo di rekening dana kelola
4	PIP SEMARANG	264,655,000	Saldo di rekening dana kelola
5	BPPTL JAKARTA	876,343,787	Saldo di dana kelolaan berupa uang sewa ruang bank dan atm BTN
6	POLTEKPEL BAROMBONG	5,146,713,392	Saldo di dana kelolaan berupa pendapatan diklat yang belum berjalan
7	POLTEKPEL SORONG	2,315,149,834	Saldo di rekening dana kelola berupa pendapatan diklat yang belum disahkan
8	POLTEKPEL MALAHAYATI	946,899,108	Pendapatan yang belum dilakukan pengesahan berupa permakanan taruna, diklat keterampilan pelaut, diklat penjenjangan, jasa layanan lainnya
9	POLTEKBANG MAKASSAR	65,111,003	Saldo di rekening Dana Kelolaan BLU yang belum menjadi hak BLU
10	POLTEKPEL SURABAYA	323,041,500	PNBP yang belum disetorkan kepada Ditkapel dan sewa ruang kas BNI
11	POLTEKPEL BANTEN	6,366,092,479	Saldo di rekening dana kelolaan
TOTAL		**30,258,968,812.**	

Kas Pada Badan Layanan Umum Rp623.527.400.175,-

C.4. Kas Pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp623.527.400.175,- dan Rp565.764.768.464,- yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara Operasional BLU yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Realisasi Kas Pada Badan Layanan Umum per Satker BLU disajikan pada sebagai berikut :

Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum

No	Nama satker	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	STIP JAKARTA	77.938.106.521	57.247.620.055
2	BP3IP JAKARTA	95.950.609.037	102.361.955.405
3	PIP SEMARANG	70.215.764.759	65.979.688.823
4	PIP MAKASSAR	38.600.861.621	31.378.543.459
5	PKTJ TEGAL	27.095.861.566	27.936.514.248
6	POLTEKBANG SURABAYA	33.605.951.370	32.777.373.933
7	POLTEKPEL SURABAYA	46.735.273.195	62.706.611.838
8	POLTEKBANG MAKASSAR	31.026.510.718	22.526.579.357
9	PPI CURUG	5.987.777.083	2.497.955.320
10	POLTEKPEL BAROMBONG	39.832.024.983	49.883.588.429
11	POLTEKPEL BANTEN	14.420.634.621	10.462.016.984
12	PPI MADIUN	16.717.916.285	7.985.567.654
13	PTDI - STTD	37.236.101.135	30.290.461.716
14	POLTEKBANG MEDAN	23.379.468.465	20.306.680.634
15	POLTEKBANG JAYAPURA	4.807.892.557	3.153.123.457
16	POLTRADA BALI	6.075.153.298	2.944.910.094
17	POLTEKPEL SORONG	7.341.260.152	4.965.681.892
18	POLTEKTRANS SDP PALEMBANG	1.930.171.529	1.110.437.100
19	BPPTL JAKARTA	12.684.950.040	3.239.269.502
20	POLTEKPEL MALAHAYATI	13.850.532.895	11.406.845.026
21	BP3 CURUG	3.874.031.408	3.657.098.719
22	API BANYUWANGI	8.196.537.577	7.820.529.460
23	POLTEKBANG PALEMBANG	6.024.009.360	3.125.715.359
TOTAL		**623.527.400.175**	**565.764.768.464**

Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum Rp10.000.000.000,-

C.5. Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,- dan Rp0,. Rincian Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut:

Rincian Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum

SATKER	REKENING	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
PKTJ TEGAL	Deposito 6 Bulan Bank BNI No.Rek. 0883564461 Int.Rate 7%	10,000,000,000	-
JUMLAH		**10,000,000,000**	**-**

Investasi tersebut merupakan Deposito 6 Bulan PKTJ Tegal.

Belanja Dibayar di Muka Rp201.366.035,-

C.6. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp201.366.035,- dan Rp256.863.396,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun

anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan sebagai berikut :

Rincian Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)

No	Satker	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	POLTEKBANG SURABAYA	17.023.833,	15.948.083
2	API BANYUWANGI	184.342.202,	187.815.313
3	BPPTL JAKARTA	-	53.100.000
Jumlah		**201.366.035**	**256.863.396**

Belanja dibayar di muka merupakan Asuransi kesehatan pegawai dan peserta diklat untuk periode 2019.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Rp120.590.278,-

C.7. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp120.590.278,- dan Rp250.064.518,-. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah Pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara. Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima disajikan sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

No	Satker	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	PIP Semarang	120,590,278.	161,300,000
2	BP3IP Jakarta	-	88,764,518
Jumlah		**120,590,278**	**250,064,518**

PIP Semarang sebesar Rp120.590.278,- yang merupakan bunga deposito yang belum dibayarkan sampai dengan per 31 Desember 2019.

Piutang Bukan Pajak Rp8.005.205.425,-

C.8. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp8.005.205.425,- dan Rp7.524.117.324,-. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun

anggaran per tanggal neraca. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak

No.	SATKER	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	PPSDMP DARAT	24.000.000	-
2	POLTEKBANG MEDAN	662.901.000	412.708.095
3	PIP MAKASSAR	6.134.210.820	6.134.210.820
4	POLTEKPEL SUMATERA BARAT	-	696.413.000
5	POLTRADA BALI	507.310.668	81.960.750
6	PPI BANYUWANGI	63.443.688	2.642.772
7	PIP SEMARANG	-	31.232.000
8	STIP JAKARTA	-	31.416.187
9	BPPTD MEMPAWAH	-	133.533.700
10	BP3IP JAKARTA	2.718.993	-
11	PPI MADIUN	96.967.959	
12	POLTRANS SDP PALEMBANG	200.497.500	
13	PKTJ TEGAL	309.150.000	
14	POLTEKBANG SURABAYA	4.004.797	
Jumlah		**8.005.205.425**	**7.524.117.324**

Keterangan :

1. PPSDMP Darat merupakan piutang atas TGR terhadap Sdr. Ranap Parhusip sesuai SK. Menteri Perhubungan Nomor KP 226 Tahun 2018;
2. Poltekbang Medan merupakan temuan BPK RI Tahun 2019 berupa Kelebihan pembayaran honorarium DPM Tahun 2019;
3. PIP Makassar merupakan piutang atas denda keterlambatan penyelesaian kapal latih;
4. Poltrada Bali merupakan kekurangan pembayaran oleh penyedia (PT. Sinarbali Binakarya) atas temuan BPK tahun 2018 berupa Pekerjaan Pembangunan Jaringan Drainase Kampus II Tahap III;
5. API Banyuwangi merupakan kelebihan deposit (uang muka) pembelian avgas (BBM Pesawat) ke PT.Pertamina sebesar Rp12.328.800 yang akan dikembalikan di Tahun 2020 dan Piutang Mandiri Utama Flying Academy (MUFA) atas penggunaan hangar untuk penyimpanan pesawat Cessna 172 sebesar Rp51.114.888;
6. BP3IP Jakarta merupakan pengembalian belanja langganan telepon yang belum disetorkan oleh pihak ketiga atau PT. PLN (Persero) sebesar Rp. 2.718.993.

7. PPI Madiun merupakan temuan BPK RI Tahun 2019 atas Denda Keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung yang telah disetor ke kas negara dengan No. NTPN 0F6FD1JNEPF48QSL tgl 31 Januari 2020, serta kelebihan belanja modal pembangungan gedung Tahun 2019 yang telah di setor dengan No. NTPN F875C55DE3OJRLED tgl 30 Januari 2020;
8. Poltektrans SDP Palembang merupakan piutang atas Kelebihan pembayaran honorarium DPM Tahun 2019;
9. PKTJ Tegal merupakan piutang atas Kelebihan pembayaran honorarium DPM Tahun 2019;
10. Poltekbang Surabaya merupakan piutang atas Kelebihan pembayaran perjalan dinas selama tahunn 2019.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak minus Rp6.159.843.503,-

C.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan piutang tidak Tertagih – piutang bukan pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp6.159.843.503,- dan minus Rp6.134.224.034,-. Penyisihan piutang tidak Tertagih - piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing debitur. Rincian estimasi penyisihan sebagaimana tersaji sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
PIP Makassar (denda keterlambatan penyelesaian kapal latih)	Macet	6.134.210.820	100,00%	6.134.210.820
API Banyuwangi (Kelebihan deposit (uang muka) pembelian avgas (BBM Pesawat) ke PT.Pertamina)	Lancar	12.328.800	0,50%	61.644
API Banyuwangi (Mandiri Utama Flying Academy (MUFA) atas penggunaan hangar untuk penyimpanan pesawat Cessna 172)	Diragukan	51.114.888	50,00%	25.557.444
BP3IP Jakarta (pengembalian belanja langganan telepon yang belum disetorkan oleh pihak ketiga atau PT. PLN (Persero))	Lancar	2.718.993	0,50%	13.595
Jumlah				**6.159.843.503**

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Rp20.196.447.422,-

C.10. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp20.196.447.422,- dan Rp29.685.055.858,- yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU

No.	Uraian Satker	31 DESEMBER 2019		31 DESEMBER 2018	
		Jumlah Debitur	Jumlah	Jumlah Debitur	Jumlah
1	Poltekbang Surabaya	47	4.398.091.999	11	3.172.618.950
2	PIP Makassar	7	7.274.000	7	10.945.000
3	Poltekpel Surabaya	106	467.347.000	-	-
4	Poltekpel Malahayati	111	869.355.000	345	1.165.460.000
5	PKTJ Tegal	683	1.156.690.000	597	1.337.100.000
6	BP3 Curug	4	2.046.817.760	1	725.269.776
7	PIP Semarang	449	659.304.000	113	450.290.000
8	Poltekbang Medan	8	1.430.739.116	108	1.234.553.551
9	Poltekpel Sorong	205	129.150.000	30	884.178.500
10	Poltekbang Makassar	19	369.778.000	1	653.460.000
11	PPI Curug	124	2.950.113.750	123	13.203.189.825
12	STIP Jakarta	14	165.175.000	25	536.709.000
13	Poltektrans SDP Palembang	0	-	20	44.318.000
14	PPI Madiun	91	1.006.671.417	146	4.329.911.800
15	PTDI - STTD	102	3.054.034.780	261	1.022.051.456
16	Poltekpel Barombong	40	192.858.000	20	24.000.000
17	BPPTL Jakarta	0	-	1	891.000.000
18	Poltekbang Palembang	1	223.800.000	-	-
19	Poltekpel Banten	73	476.247.600	-	-
20	BP3IP Jakarta	2	593.000.000	-	-
	JUMLAH	**2.086**	**20.196.447.422**	**1.809**	**29.685.055.858**

Sedangkan mutasi Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**29,685,055,858**
Mutasi / Kurang:		
Poltekbang Surabaya :		
- Pelunasan Piutang 2018	Rp	(3,172,618,950)
+ Penambahan Diklat Pembentukan 2019	Rp	326,219,500
+ Penambahan Diklat Pelatihan 2019	Rp	4,071,872,499
PIP Makassar :		
- Pembayaran Piutang 2018	Rp	(3,671,000)
Poltekpel Surabaya :		
+ Penambahan Piutang Daftar Ulang dan Permakanan Taruna	Rp	467,347,000
Poltekpel Malahayati		
- Pembayaran Piutang Tahun 2018	Rp	(1,165,460,000)
+ Penambahan Piutang Tahun 2019	Rp	869,355,000
PKTJ Tegal :		
- Pembayaran Piutang Tahun 2018	Rp	(1,304,200,000)
+ Penambahan Piutang Tahun 2019	Rp	1,123,790,000
BP3 Curug:		
- Pelunasan Piutang Tahun 2018	Rp	(725,269,776)
+ Penambahan Piutang Tahun 2019	Rp	2,046,817,760
PIP Semarang :		
- Pelunasan Piutang Tahun 2018	Rp	(450,290,000)
+ Penambahan Layanan Pendidikan 2019	Rp	659,304,000
Poltekbang Medan :		
- Pelunasan Piutang Tahun 2018	Rp	(1,234,553,551)
+ Penambahan Piutang SPP dan Uang Makan Taruna	Rp	303,743,000
+ Penambahan Piutang Kerjasama Diklat 2019	Rp	1,126,996,116
Poltekpel Sorong :		
- Pelunasan Piutang Tahun 2018	Rp	(884,178,500)
+ Penambahan Piutang Layanan Pendidikan 2019	Rp	129,150,000
Poltekbang Makassar		
- Pelunasan Piutang TA. 2018	Rp	(653,460,000)
+ Penambahan Piutang Layanan Pendidikan 2019	Rp	369,778,000
PPI Curug :		
- Pelunasan Piutang TA. 2018	Rp	(12,192,926,625)
+ Penambahan Piutang Layanan Pendidikan 2019	Rp	1,939,850,550
STIP Jakarta :		
- Pelunasan Piutang TA. 2018	Rp	(536,709,000)
+ Penambahan Piutang TA. 2019	Rp	165,175,000
Poltektrans SDP Palembang :		
- Pelunasan Piutang Permakanan Taruna TA. 2018	Rp	(44,318,000)
PPI Madiun :		
- Pelunasan Piutang Layanan Pendidikan TA. 2018	Rp	(4,329,911,800)
+ Penambahan Piutang Diklat Pembentukan	Rp	274,575,000
+ Penambahan Piutang Diklat PT. LEN REKAPRIMA SEMESTA	Rp	732,096,417
PTDI - STTD :		
- Pelunasan Piutang Layanan Pendidikan TA. 2018	Rp	(1,022,051,456)
+ Penambahan Piutang Pelayanan Pendidikan	Rp	3,054,034,780
Poltekpel Barombong :		
- Pelunasan Piutang permakanan taruna	Rp	(24,000,000)
+ Penambahan Piutang Permakanan	Rp	92,400,000
+ Penambahan Piutang Semester Taruna	Rp	100,458,000
Poltekpel Banten :		
+ Penambahan Piutang Pelayanan Pendidikan	Rp	476,247,600
BPPTL Jakarta :		
- Pelunasan Piutang Diklat Kerjasama (Teknis Awal Dasar-dasar Kesyahbandaran)	Rp	(891,000,000)
Poltekbang Palembang :		
+ Penambahan Piutang Jasa Pelayanan Pendidikan	Rp	223,800,000
BP3IP Jakarta:		
+ Penambahan Piutang Jasa Pelayanan Pendidikan	Rp	593,000,000
Saldo per 31 Desember 2019	**Rp**	**20,196,447,422**

Mutasi Piutang dari Operasional BLU per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

NO	Klasifikasi Piutang	Saldo Awal 31 Desember 2018 (Audited)	Penambahan Piutang Tahun 2019	Pelunasan atas Piutang Tahun 2019	Pelunasan atas Piutang 2018	Saldo per 31 Desember 2019
	PIUTANG DARI KEG. OPERASIONAL BLU					
1	STIP Jakarta	536,709,000	1,240,870,000	1,075,695,000	536,709,000	165,175,000
2	Poltekbang Makassar	653,460,000	369,778,000	-	653,460,000	369,778,000
3	Poltekbang Surabaya	3,172,618,950	5,279,764,999	881,673,000	3,172,618,950	4,398,091,999
4	Poltekpel Surabaya	-	933,749,000	466,402,000	-	467,347,000
5	PIP Makassar	10,945,000	89,940,000	82,666,000	10,945,000	7,274,000
6	Poltekpel Barombong	24,000,000	192,858,000	-	24,000,000	192,858,000
7	Poltekbang Medan	1,234,553,551	14,420,993,616	12,990,254,500	1,234,553,551	1,430,739,116
8	PPI Madiun	4,329,911,800	4,192,092,017	3,185,420,600	4,329,911,800	1,006,671,417
9	Poltekpel Malahayati	1,165,460,000	941,824,000	72,469,000	1,165,460,000	869,355,000
10	Poltekbang Palembang	-	4,485,816,000	4,262,016,000	-	223,800,000
11	PIP Semarang	450,290,000	1,118,182,000	458,878,000	450,290,000	659,304,000
12	Poltekpel Sorong	884,178,500	129,150,000	-	884,178,500	129,150,000
13	Poltektrans SDP Palembang	44,318,000	7,140,000	7,140,000	44,318,000	-
14	Poltekpel Banten	-	476,247,600	-	-	476,247,600
15	PTDI - STTD	1,022,051,456	21,071,988,200	18,017,953,420	1,022,051,456	3,054,034,780
16	PPI Curug	13,203,189,825	77,710,809,448	75,770,958,898	12,192,926,625	2,950,113,750
17	PKTJ Tegal	1,337,100,000	1,123,790,000	-	1,304,200,000	1,156,690,000
18	BPPTL Jakarta	891,000,000	-	-	891,000,000	-
19	BP3 Curug	725,269,776	2,951,469,770	904,652,010	725,269,776	2,046,817,760
20	BP3IP Jakarta	-	593,000,000	-	-	593,000,000
						-
	Sub Jumlah	**29,685,055,858**	**137,329,462,650**	**118,176,178,428**	**28,641,892,658**	**20,196,447,422**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum minus Rp1.622.698.376,-

C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang merupakan Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar minus Rp1.622.698.376,- dan minus Rp2.379.182.876,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Berikut disajikan perhitungan Penyisihan piutang tidak tertagih jangka pendek per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Satker	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Poltekbang Surabaya	Lancar (0-30 hari)	4,398,091,999	0.50%	21,990,460.00
PIP Makassar	Macet (>91 hari)	7,274,000	100.00%	7,274,000.00
Poltekpel Malahayati	Lancar (0-30 hari)	675,473,000	0.50%	3,377,365.00
	Kurang Lancar (31-60 hari)	193,882,000	10%	19,388,200.00
PKTJ Tegal	Lancar (0-30 hari)	1,104,890,000	0.50%	5,524,450.00
	Kurang Lancar (31-60 hari)	47,800,000	10%	4,780,000.00
	Diragukan (61-90 hari)	4,000,000	50.00%	2,000,000.00
BP3 Curug	Lancar (0-30 hari)	2,046,817,760	0.50%	10,234,087.80
PIP Semarang	Lancar (0-30 hari)	659,304,000	0.50%	3,296,520.00
Poltekbang Medan	Lancar (0-30 hari)	455,989,316	0.50%	2,279,946.58
	Kurang Lancar (31-60 hari)	974,749,800	10%	97,474,980.00
Poltekpel Sorong	Lancar (0-30 hari)	129,150,000	0.50%	645,750.00
PPI Curug	Lancar (0-30 hari)	597,711,250	0.50%	2,988,556.25
	Kurang Lancar (31-60 hari)	1,162,040,000	10.00%	116,204,000.00
	Diragukan (61-90 hari)	241,096,000	50.00%	120,548,000.00
	Macet (>91 hari)	949,266,500	100.00%	949,266,500.00
STIP Jakarta	Lancar (0-30 hari)	165,175,000	0.50%	825,875.00
PPI Madiun	Lancar (0-30 hari)	1,006,671,417	0.50%	5,033,358.00
PTDI - STTD	Lancar (0-30 hari)	3,054,034,780	0.50%	15,270,173.90
Poltekpel Surabaya	Lancar (0-30 hari)	467,347,000	0.50%	2,336,735.00
Poltekbang Palembang	Macet (>91 hari)	223,800,000	100.00%	223,800,000.00
Poltekpel Barombong	Lancar (0-30 hari)	192,858,000	0.50%	964,290.00
Poltekbang Makassar	Lancar (0-30 hari)	369,778,000	0.50%	1,848,890.00
Poltekpel Banten	Lancar (0-30 hari)	476,247,600	0.50%	2,381,238.00
BP3IP Jakarta	Lancar (0-30 hari)	593,000,000	0.50%	2,965,000.00
TOTAL		**20,196,447,422**		**1,622,698,376**

Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Rp1.634.577.549,-

C.12. Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU adalah Piutang-piutang yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan aktivitas bisnis utama BLU. Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.634.577.549,- dan Rp863.172.748,-.

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per Satker BLU

No.	Uraian Satker	Jumlah Debitur	Jumlah
1	POLTEKPEL MALAHAYATI	1	13.556.400
2	PTDI - STTD	2	1.219.200.000
3	STIP JAKARTA	2	5.926.190
4	PIP SEMARANG	7	72.899.500
5	POLTEKBANG SURABAYA	1	6.400.000
6	POLTEKBANG MEDAN	4	35.435.000
7	BP3 CURUG	1	93.000.000
8	BP3IP JAKARTA	3	182.684.569
9	POLTEKTRANS SDP PALEMBANG	1	5.475.890
	JUMLAH	**22**	**1.634.577.549**

Sedangkan mutasi Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**863.172.748**
Mutasi tambah/kurang :		
BP3IP Jakarta :		
+ Penambahan Piutang Pendapatan atas Fee Jasa Layanan & Sewa Ruangan	Rp	139.844.569
STIP Jakarta :		
- Pelunasan Piutang 2018	Rp	(26.397.791)
+ Piutang Sewa Kantin dan Rumah Dinas	Rp	4.464.390
+ Piutang Klaim BPJS	Rp	1.461.800
Poltekbang Medan :		
- Pembayaran Piutang TA 2018	Rp	(116.919.757)
Poltekpel Malahayati :		
- Pembayaran Piutang TA 2018	Rp	(11.830.200)
+ Piutang Sewa Payment Point dan ATM BTN Tahun 2019	Rp	13.556.400
PIP Semarang :		
+ Piutang Sewa Ruangan Kantin dan ATM	Rp	18.049.500
+ Piutang PT PDS (Diklat Maritime English & Marlins Test	Rp	54.850.000
PTDI - STTD :		
- Pelunasan Piutang 2018	Rp	(508.000.000)
+ Piutang Kontribusi Tetap KSO Topotels & Denda Keterlambatan Kontribusi Tetap	Rp	1.219.200.000
Poltekbang Surabaya :		
- Pelunasan Piutang 2018	Rp	(121.750.000)
+ Piutang Sewa Ruangan Kantin	Rp	6.400.000
BP3 Curug :		
+ Piutang Sewa Ruangan	Rp	93.000.000
Poltektrans SDP Palembang :		
+ Piutang Bunga Deposito 2019	Rp	5.475.890
Saldo per 31 Desember 2019	**Rp**	**1.634.577.549**

Mutasi Tambah dan Kurang Piutang Non Operasional BLU :

NO	Klasifikasi Piutang	Saldo Awal 31 Desember 2018 (Audited)	Penambahan Piutang Tahun 2019	Pelunasan atas Piutang Tahun 2019	Pelunasan atas Piutang 2018	Saldo per 31 Desember 2019
	PIUTANG DARI KEGIATAN OP. NON BLU					
1	STIP Jakarta	26.397.791	144.091.548	138.165.358	26.397.791	5.926.190
2	Poltekbang Medan	152.354.757	6.250.000	1.750.000	121.419.757	35.435.000
3	Poltekpel Malahayati	11.830.200	13.556.400	-	11.830.200	13.556.400
4	Poltekbang Surabaya	121.750.000	6.400.000	-	121.750.000	6.400.000
5	PTDI - STTD	508.000.000	1.219.200.000	-	508.000.000	1.219.200.000
6	PIP Semarang	-	72.899.500	-	-	72.899.500
7	BP3IP Jakarta	42.840.000	524.047.069	384.202.500	-	182.684.569
8	BP3 Curug	-	93.000.000	-	-	93.000.000
9	Poltektrans SDP Palembang	-	5.475.890	-	-	5.475.890
	Sub Jumlah	**863.172.748**	**2.084.920.407**	**524.117.858**	**789.397.748**	**1.634.577.549**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum minus Rp12.288.713 ,-

C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar minus Rp12.288.713,- dan Rp6.792.215,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Satker	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
BP3IP Jakarta	Lancar	149.184.569	0,50%	745.923
	Kurang Lancar	33.500.000	10,00%	3.350.000
STIP Jakarta	Lancar	5.926.190	0,50%	29.631
Poltekbang Medan	Lancar	24.600.000	0,50%	123.000
	Kurang Lancar	10.835.000	10,00%	1.083.500
Poltekpel Malahayati	Lancar	13.556.400	0,50%	67.782
PIP Semarang	Lancar	72.899.500	0,50%	364.498
Poltekbang Surabaya	Lancar	6.400.000	0,50%	32.000
PTDI - STTD	Tidak Disisihkan (Temuan BPK)	19.200.000	0,00%	-
	Lancar	1.200.000.000	0,50%	6.000.000
BP3 Curug	Lancar	93.000.000	0,50%	465.000
Poltektrans SDP Palembang	Lancar	5.475.890	0,50%	27.379
Total		**1.634.577.549**		**12.288.713**

Persediaan Rp99.662.210.963,-

C.14. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp99.662.210.963,- dan Rp89.746.565.729,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji sebagai berikut :

Rincian Persediaan

No	Uraian	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Barang Konsumsi	4,251,457,731	5,030,353,871
2	Bahan untuk Pemeliharaan	124,192,857	322,591,101
3	Suku Cadang	76,902,059,236	69,160,710,736
4	Bahan Baku	12,371,483,845	12,326,397,787
5	Persediaan Lainnya	6,013,017,294	2,906,512,234
TOTAL		**99,662,210,963**	**89,746,565,729**

Rekapitulasi Persediaan Khusus Satker BLU di Lingkungan BPSDM Perhubungan sebagai berikut :

NO	NAMA SATKER	JUMLAH PERSEDIAAN
1	POLTEKPEL SURABAYA	1,108,510,728
2	POLTEKBANG SURABAYA	185,479,980
3	PIP SEMARANG	535,411,271
4	BP3IP JAKARTA	1,306,327,189
5	STIP JAKARTA	684,040,318
6	PKTJ TEGAL	44,653,900
7	PIP MAKASSAR	1,696,919,843
8	PPI CURUG	74,870,292,204
9	POLTEKBANG MEDAN	65,175,600
10	PPI MADIUN	17,884,540
11	POLTEKPEL MALAHAYATI	183,657,150
12	POLTRADA BALI	15,079,730
13	POLTEKBANG MAKASSAR	85,966,114
14	POLTEKBANG JAYAPURA	85,857,906
15	POLTEKPEL SORONG	67,598,810
16	POLTEKTRANS SDP PALEMBANG	134,295,670
17	POLTEKPEL BAROMBONG	128,938,991
18	BPPTL JAKARTA	72,041,197
19	POLTEKPEL BANTEN	168,087,622
20	PTDI - STTD	1,412,382
21	API BANYUWANGI	14,438,449,920
22	BP3 CURUG	8,896,160
23	POLTEKBANG PALEMBANG	5,887,500
TOTAL		**95,910,864,725**

Rekapitulasi Persediaan Satker NON BLU di Lingkungan BPSDM Perhubungan sebagai berikut :

NO	NAMA SATKER	JUMLAH PERSEDIAAN
1	Sekretariat BPSDM Phb	97,776,824
2	PPSDM Perhubungan Darat	6,141,080
3	PPSDM Perhubungan Laut	15,866,400
4	PPSDM Perhubungan Udara	3,619,300
5	PPSDM Aparatur Phb	1,625,910
6	POLTEKPEL SUMATERA BARAT	45,438,455
7	POLTEKPEL SULAWESI UTARA	3,226,729,424
8	BP3KSDMT Bandung	231,860,650
9	BP2TD Mempawah	122,288,195
TOTAL		**3,751,346,238**

Aset Tetap
Rp17.276.659.287.906,-

Aset Tetap

Tanah
Rp7.703.080.421.347,-

C.15. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 untuk masing-masing sebesar Rp7.703.080.421.347,- dan Rp7.838.980.888.847,-. Rincian nilai Tanah per 31 Desember 2019 tersaji sebagai berikut :

Rincian Tanah

NO	SATKER	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan/Penurunan
1	PPSDM Phb Darat	77.097.966.000	77.097.966.000	-
2	PPSDM Aparatur Phb	36.671.964.000,	36.671.964.000	-
3	PIP Makassar	645.131.025.500	645.131.088.500	(63.000)
4	BP3IP Jakarta	298.777.105.000	273.492.807.000	25.284.298.000
5	Poltekpel Banten	293.884.688.000,	293.884.688.000	-
6	Poltekpel Sorong	65.880.169.000,	94.392.190.000	(28.512.021.000)
7	Poltekpel Malahayati	80.521.778.500,	78.635.301.000	1.886.477.500
8	Poltekpel Barombong	385.037.535.000,	385.037.535.000	-
9	Poltekpel Surabaya	1.217.516.259.000,	1.426.046.652.000	(208.530.393.000)
10	STIP Jakarta	1.372.656.239.000	1.387.105.252.000	(14.449.013.000)
11	PIP Semarang	922.359.633.000,	922.359.633.000	-
12	Poltekpel Sumatera Barat	38.808.288.730,	38.808.288.730	-
13	BPPTL Jakarta	250.342.511.000,	250.342.511.000	-
14	Poltekbang Surabaya	425.217.777.000,	444.740.137.000	(19.522.360.000)
15	Poltekbang Medan	62.713.348.000,	62.713.348.000	-
16	Poltekbang Makassar	188.710.893.000,	188.710.893.000	-
17	API Banyuwangi	108.372.017.000,	108.372.017.000	-
18	Poltekbang Palembang	112.739.005.000,	39.219.812.000	73.519.193.000
19	Poltekbang Jayapura	85.537.275.000,	85.537.275.000	-
20	PKTJ Tegal	371.510.064.000,	371.510.064.000	-
21	Poltrada Bali	120.238.130.000,	120.238.130.000	-
22	Poltektrans SDP Palembang	68.285.714.000,	24.948.000.000	43.337.714.000
23	PTDI - STTD	298.051.765.000,	308.675.653.000	(10.623.888.000)
24	PPI Madiun	118.745.688.000,	118.745.688.000	-
25	BP3KSDMT Pasir Jambu	29.131.970.794,	29.131.970.794	-
26	BPPTD Mempawah	29.141.612.823	27.432.024.823	1.709.588.000
JUMLAH		**7.703.080.421.347**	**7.838.980.888.847**	**(135.900.467.500)**

Mutasi Tanah periode 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Reklas Masuk senilai Rp5.172.190.522,- dan Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai (Rp3.462.602.522,-) pada satker BPPTD Mempawah,-;

b) Koreksi Kesalahan Input IP pada satker PIP Makassar senilai (Rp63.000,-), STIP Jakarta senilai (Rp14.449.013.000,-), BP3IP Jakarta senilai Rp25.284.298.000,-, PTDI - STTD senilai (Rp10.623.888.000,-), Poltekpel Sorong senilai (Rp32.194.752.000,-), Poltekbang Palembang senilai Rp73.519.193.000,-, Poltektrans SDP Palembang senilai Rp43.337.714.000,- dan Poltekbang Surabaya senilai (Rp19.522.360.000,-);

c) Pembelian & Pengembangan Nilai Aset tanah pada satker Poltekpel Sorong senilai Rp3.600.000.000,-.

d) Terdapat Kapitalisasi ATB ke Aset Tetap Tanah atas rekomendasi KAP pada satker Poltekpel Malahayati Aceh senilai Rp1.886.477.500,.

Peralatan dan Mesin Rp8.879.557.449.152,-

C.16. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp8.879.557.449.152,- dan Rp8.727.991.066.406,-. Rincian nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 tersaji sebagai berikut :

Rincian Peralatan dan Mesin

NO	SATKER	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat BPSDM	44,616,942,654	45,571,675,654	(954,733,000)
2	Poltekbang Palembang	101,179,237,977	101,878,400,827	(699,162,850)
3	Pusbang Darat	6,293,184,721	6,805,568,685	(512,383,964)
4	BP3KSDMT Pasir Jambu	42,898,659,480	42,500,403,842	398,255,638
5	Poltekpel Sumatera Barat	181,341,656,948	178,591,059,968	2,750,596,980
6	Pusbang Aparatur	44,142,122,372	50,412,652,001	(6,270,529,629)
7	Pusbang Laut	6,565,930,723	6,335,361,972	230,568,751
8	Pusbang Udara	11,173,087,961	12,048,947,461	(875,859,500)
9	Poltekpel Sulawesi Utara	234,211,953,994	234,135,453,994	76,500,000
10	BP3 Curug	52,574,160,205	49,941,326,355	2,632,833,850
11	Poltekpel Banten	340,409,149,809	334,605,611,069	5,803,538,740
12	Poltrada Bali	96,968,758,217	87,037,472,243	9,931,285,974
13	Poltekpel Surabaya	401,755,069,775	383,743,975,499	18,011,094,276
14	Poltekbang Jayapura	110,960,666,298	112,141,291,521	(1,180,625,223)
15	Poltekbang Makassar	356,698,107,552	356,098,409,552	599,698,000
16	Poltekbang Medan	372,884,983,635	365,464,721,907	7,420,261,728
17	Poltekbang Surabaya	326,444,662,793	275,129,268,830	51,315,393,963
18	Poltektrans SDP Palembang	89,804,289,518	86,339,041,798	3,465,247,720
19	Poltekpel Sorong	195,287,291,651	200,926,194,371	(5,638,902,720)
20	Poltekpel Malahayati	170,676,394,607	103,859,173,250	66,817,221,357
21	Poltekpel Barombong	246,031,760,334	236,490,410,411	9,541,349,923
22	PTDI - STTD	206,025,122,979	201,686,102,259	4,339,020,720
23	BPPTL Jakarta	79,176,369,580	78,266,909,168	909,460,412
24	PIP Semarang	351,506,499,102	372,461,463,907	(20,954,964,805)
25	BP3IP Jakarta	391,169,844,006	389,911,789,606	1,258,054,400
26	STIP Jakarta	419,835,533,167	471,411,976,874	(51,576,443,707)
27	PKTJ Tegal	124,895,994,321	123,072,410,357	1,823,583,964
28	PIP Makassar	527,141,270,783	527,826,988,623	(685,717,840)
29	PPI Madiun	173,446,639,846	172,803,275,583	643,364,263
30	API Banyuwangi	614,121,916,737	609,927,089,777	4,194,826,960
31	PPI Curug	2,521,795,945,679	2,474,888,439,179	46,907,506,500
32	BPPTD Mempawah	37,524,241,728	35,678,199,863	1,846,041,865
JUMLAH		**8,879,557,449,152**	**8,727,991,066,406**	**151,566,382,746**

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ***antara lain yang signifikan*** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	8,727,991,066,406
Mutasi tambah:		
Saldo Awal		
Pembelian	Rp	75,705,059,753
Transfer Masuk	Rp	145,127,648,226
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	36,863,070,086
Reklasifikasi Masuk	Rp	210,844,994,665
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp	6,444,093,525
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	282,622,869
Pengembangan Nilai Aset	Rp	10,684,601,553
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	(7,495,144,090)
Transaksi Normalisasi BMN	Rp	13,832,299,744
Hibah Masuk	Rp	3,066,427,000
Mutasi kurang:		
Penghapusan	Rp	(1,501,213,100)
Transfer Keluar	Rp	(62,692,261,026)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(211,298,020,605)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola		
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya		
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	(68,297,795,854)
Saldo per 31 Desember 2019	**Rp**	**8,879,557,449,152**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Rp	5,526,482,869,150
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**Rp**	**3,353,074,580,002**

1. Hibah Mobil dari PT. Asuransi Umum Bumida 1967 senilai Rp236.100.000,- dan Hibah Mobil dari Bank BTN senilai Rp1.141.700.000,- pada satker Poltekpel Barombong, Reklas ke Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sesuai rekomendasi KAP;
2. Hibah Kendaraan dari Bank Mandiri senilari Rp385.000.000,- pada satker PPI Curug;
3. Hibah Mini Bus senilai Rp493.000.000,- dari Bank BNI kepada satker BP3IP Jakarta;
4. Hibah Kendaraan senilai Rp810.627.000 pada satker Poltekpel Banten;
5. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Satker	Uraian Bidang	Nilai
1	BPPTD MEMPAWAH	KOMPUTER	204.790.080
2	BPPTD MEMPAWAH	ALAT KANTOR & RUMAH	1.249.071.785
3	BPPTL JAKARTA	ALAT PERAGA	2.127.095.000
4	POLTEKPEL BAROMBONG	ALAT LABORATORIUM	1.088.398.000
5	POLTEKPEL BAROMBONG	ALAT ANGKUTAN	2.910.706.746
6	POLTEKPEL SUMATERA BARAT	ALAT KANTOR & RUMAH	1.910.339.000
7	POLTEKPEL MALAHAYATI	ALAT LABORATORIUM	8.672.000.000
8	POLTEKPEL MALAHAYATI	ALAT STUDIO, KOMUNIKA	790.489.150
9	POLTEKBANG SURABAYA	ALAT PERAGA	4.012.193.000
10	POLTEKBANG MEDAN	ALAT PERAGA	5.991.159.400
11	POLTEKBANG MEDAN	ALAT LABORATORIUM	2.716.193.925
12	POLTEKPEL SURABAYA	ALAT PERAGA	2.325.126.000
13	BP3 CURUG	ALAT BESAR	2.865.508.000
	TOTAL 9 SATKER	**TOTAL NILAI**	**36.863.070.086**

6. Beberapa rincian transfer masuk dengan nilai yang signifikan antara lain :
   - Transfer Masuk Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Turbin (Full Jet) pada satker PPI Curug senilai Rp29.469.448.000,- dan Poltekbang Surabaya Rp49.588.719.200,- dari BLU Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
   - Transfer Masuk Kapal Latih pada Poltekpel Malahayati Aceh dari STIP Jakarta senilai Rp56.295.794.107,-.
7. Pembelian Peralatan Mesin pada PIP Semarang berupa :
   - 1 unit Bus (penumpang 30 orang keatas) senilai Rp1.677.500.000,-;
   - 2 unit Micro Bus (penumpang 15 – 29 orang) senilai Rp1.594.000.000,-;
   - 2 unit mini bus (penumpang 14 orang kebawah) senilai Rp1.131.000.000,-;
   - 4 unit *baggage trolly* senilai Rp10.126.300,-;
   - 4 unit elevator/lift senilai Rp2.467.975.275,-;
   - 1 unit mesin bor beton senilai Rp6.385.830,-;
   - 1 unit tali Kamanter Dinimic senilai Rp2.887.500,-.
8. Pembelian Kendaraan Operasional senilai Rp509.087.810,- dan Kendaraan Kurvei senilai Rp946.000.000,- serta pengadaan server senilai Rp198.000.000,- pada satker PTDI - STTD;
9. Pembelian alat Lab pada satker Poltekbang Palembang senilai Rp478.000.000,-;
10. Pembelian Kendaraan Mini Bus (penumpang 14 orang) dan Kendaraan Bermotor dengan total nilai Rp2.765.499.000,- pada satker Poltekpel Banten;
11. Pembelian 1 unit Forklift pada satker Poltrada Bali senilai Rp275.000.000,-.

12. Beberapa transaksi Transfer Keluar yang signifikan antara lain:
    - Transfer keluar peralatan & mesin dari PPI Curug kepada API Banyuwangi

No	Kode Barang	Uraian Barang	Transfer Keluar
1	3010101005	Aircraft Towing Tractor	169,934,000
2	3030205012	Wheel Chock (Perkakas Standard (standard Tools))	156,314,400
3	3030206999	Perkakas Khusus (Special Tools) Lainnya	2,093,348,600
4	3030212016	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	150,863,650
5	3150405001	Genset	1,109,190,600
6	3150499999	Alat Kerja Penerbangan Lainnya	1,019,963,000
7	3080110001	Wheel Balancer	21,142,000
8	3030103001	Battery Charge	126,552,800
		Jumlah	**4,847,309,050**

    - Transfer Keluar Kapal Latih STIP Jakarta kepada Poltekpel Malahayati senilai Rp56.295.794.107,-.
13. Reklas peralatan dan mesin ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada satker POLTEKPEL Sorong senilai Rp570.499.240,-;
14. Reklas masuk peralatan dan mesin dari gedung dan bangunan senilai Rp1.096.700.000,- dan reklas peralatan dan mesin ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah senilai Rp2.914.392.240,- berdasarkan rekomendasi KAP pada PIP Makassar.

Gedung dan Bangunan senilai Rp5.191.697.362.651,-

C.17. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp5.191.697.362.651,- dan Rp5.631.491.050.347,-. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Gedung dan Bangunan

NO	SATKER	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan/Penurunan
1	Poltekbang Palembang	74,285,741,535.	95,491,789,535	(21,206,048,000)
2	PPSDMP Darat	9,152,868,000.	9,152,868,000	-
3	BP3KSDMT Pasir Jambu	72,691,536,063.	76,738,839,063	(4,047,303,000)
4	Potekpel Sumatera Barat	281,068,234,769.	271,033,840,769	10,034,394,000
5	PPSDM Aparatur Phb	151,058,354,700.	138,293,302,700	12,765,052,000
6	PPSDMP Udara	33,544,772,000.	33,218,660,000	326,112,000
7	Poltekpel Sulawesi Utara	258,223,682,154.	258,223,682,154	-
8	BP3 Curug	90,861,466,212.	85,855,872,645	5,005,593,567
9	Potlekpel Banten	148,287,361,521.	142,169,207,995	6,118,153,526
10	Poltrada Bali	183,135,854,900.	169,366,544,200	13,769,310,700
11	Poltekpel Surabaya	325,633,644,270.	745,176,214,652	(419,542,570,382)
12	Poltekbang Jayapura	174,985,268,268.	175,078,995,268	(93,727,000)
13	Poltekbang Makassar	316,989,134,079.	374,733,490,079	(57,744,356,000)
14	Poltekbang Medan	67,968,348,000.	66,427,087,000	1,541,261,000
15	Poltekbang Surabaya	165,982,070,552.	165,901,682,552	80,388,000
16	Poltektrans SDP Palembang	129,600,902,590.	109,084,594,590	20,516,308,000
17	Poltekpel Sorong	125,860,688,409.	127,246,569,409	(1,385,881,000)
18	Poltekpel Malahayati	209,975,363,440.	232,965,994,140	(22,990,630,700)
19	Poltekpel Barombong	97,819,298,390.	76,796,637,255	21,022,661,135
20	PTDI - STTD	243,496,944,007.	225,293,315,619	18,203,628,388
21	BPPTL Jakarta	94,281,453,457.	91,819,666,957	2,461,786,500
22	PIP Semarang	161,123,186,932.	169,943,448,701	(8,820,261,769)
23	BP3IP Jakarta	31,751,310,610.	27,147,474,500	4,603,836,110
24	STIP Jakarta	347,203,786,903.	435,372,270,903	(88,168,484,000)
25	PKTJ Tegal	154,626,855,994.	100,917,702,435	53,709,153,559
26	PIP Makassar	376,512,914,971.	370,203,785,971	6,309,129,000
27	PPI Madiun	263,822,908,083.	243,497,211,137	20,325,696,946
28	API Banyuwangi	54,017,245,616.	106,736,891,142	(52,719,645,526)
29	PPI Curug	377,210,781,398.	336,975,669,948	40,235,111,450
30	BPPTD Mempawah	170,525,384,828.	170,627,741,028	(102,356,200)
JUMLAH		**5,191,697,362,651**	**5,631,491,050,347**	**(439,793,687,696)**

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembelian (pembangunan) 1 unit Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen senilai Rp191.497.900,- dan 1 unit Gedung Pos Jaga Permanen senilai Rp149.527.400, Kapitalisasi ATB ke Gedung dan Bangunan senilai Rp875.572.000,- pada Poltekpel Malahayati,-;
2. Pembelian Kanopi pada satker BP3 Curug senilai Rp93.881.000,-, Reklas dari aset Gedung Bangunan Laboratorium Permanen ke Jalan Khusus Lainnya senilai Rp194.006.837,- atas rekomendasi BPK;
3. Mutasi Gedung dan Bangunan pada satker Poltekpel Surabaya sebagai berikut:
   - Reklas Keluar dan Masuk senilai Rp362.471.787.000,- pada Poltekpel Surabaya merupakan tindak lanjut temuan BPK atas hasil reval gedung dan bangunan;
   - Pembelian (pembangunan) rumah pompa senilai Rp196.395.078,-;
   - Pengembangan nilai aset berupa pembuatan kanopi gedung pos jaga

permanen senilai Rp38.413.540,-;

- Penghentian aset dari penggunaan seniali Rp138.777.000,- berupa 6 unit kantin semi permanen karena tidak sesuai dengan tata ruang peruntukannya.

4. Koreksi Pencatatan senilai Rp49.527.749.526,- pada API Banyuwangi merupakan tindak lanjut hasil revaluasi tahun 2018;
5. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp1.354.790.000,- pada Poltekbang Makassar yang merupakan kapitalisasi atas pemeliharaan gedung dan bangunan tahun sebelumnya;
6. Penyesuaian hasil revaluasi BMN pada Poltekbang Jayapura senilai Rp106.648.000,-;
7. Pembelian Gedung dan Bangunan berupa Kanopi senilai Rp183.163.000,- pada Poltekbang Surabaya,-;
8. Mutasi Gedung dan Bangunan pada Poltrada Bali senilai terdiri dari :

No	Nama Satker	Uraian Bidang	Uraian Transaksi	Nilai
1	POLTRADA BALI	BANGUNAN GEDUNG	Transaksi Normalisasi BMN	0
2	POLTRADA BALI	BANGUNAN GEDUNG	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	972,113,900
3	POLTRADA BALI	MONUMEN	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	53,470,000
4	POLTRADA BALI	BANGUNAN GEDUNG	Koreksi Kesalahan input IP	-3,156,830,000
5	POLTRADA BALI	BANGUNAN GEDUNG	Pembelian	562,273,200
6	POLTRADA BALI	BANGUNAN GEDUNG	Pengembangan Melalui KDP	14,760,583,600
7	POLTRADA BALI	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	Transaksi Normalisasi BMN	0
8	POLTRADA BALI	BANGUNAN GEDUNG	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0
9	POLTRADA BALI	MONUMEN	Pembelian	577,700,000
10	POLTRADA BALI	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0
			TOTAL MUTASI	**13,769,310,700**

9. Penghentian aset gedung dan bangunan pada PPI Curug senilai Rp2.914.954.000,- berupa rumah dinas yang rusak berat;
10. Koreksi kesalahan input IP gedung dan bangunan dapat ditampilkan dengan rincian sebagai berikut:

No	SATKER	URAIAN	NILAI
1	POLTRADA BALI	Koreksi Kesalahan input IP	-3,156,830,000
2	PPI MADIUN	Koreksi Kesalahan input IP	-780,291,000
3	PPSDMP UDARA	Koreksi Kesalahan input IP	344,978,000
4	POLTEKPEL MALAHAYATI ACEH	Koreksi Kesalahan input IP	-24,207,228,000
5	BP3 CURUG	Koreksi Kesalahan input IP	3,435,559,000
6	POLTEKBANG SURABAYA	Koreksi Kesalahan input IP	-87,775,000
7	PIP MAKASSAR	Koreksi Kesalahan input IP	-21,811,402,000
8	BP2TL	Koreksi Kesalahan input IP	693,072,000
9	BP3 PALEMBANG	Koreksi Kesalahan input IP	-23,565,181,000
10	PPI CURUG	Koreksi Kesalahan input IP	37,633,396,000
11	POLTEKPEL BANTEN	Koreksi Kesalahan input IP	-2,558,984,000
12	POLTEKBANG JAYAPURA	Koreksi Kesalahan input IP	-93,727,000
13	POLTEKPEL SURABAYA	Koreksi Kesalahan input IP	-86,151,574,000
14	POLTRANS SDP PALEMBANG	Koreksi Kesalahan input IP	21,870,358,000
15	POLTEKBANG MAKASSAR	Koreksi Kesalahan input IP	-59,099,146,000
16	POLTEKPEL SUMATERA BARAT	Koreksi Kesalahan input IP	8,202,119,000
17	PPSDMP APARATUR	Koreksi Kesalahan input IP	12,765,052,000
18	PKTJ TEGAL	Koreksi Kesalahan input IP	49,261,500
19	PTDI STTD	Koreksi Kesalahan input IP	1,324,989,000
20	PIP SEMARANG	Koreksi Kesalahan input IP	-8,820,261,769
21	STIP JAKARTA	Koreksi Kesalahan input IP	-89,423,082,000
22	PPSDMP DARAT	Koreksi Kesalahan input IP	-133,179,000
23	BP3KSDMT PASIR JAMBU	Koreksi Kesalahan input IP	-3,985,703,000
24	POLTEBANG MEDAN	Koreksi Kesalahan input IP	1,338,561,000
25	POLTEKPEL SORONG	Koreksi Kesalahan input IP	-1,385,881,000
26	POLTEKPEL BAROMBONG	Koreksi Kesalahan input IP	6,426,974,000
		TOTAL	**(231,175,925,269.00)**

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp1.766.793.499.845,-

C.18. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.766.793.499.845,- dan Rp1.154.775.234.038,-. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	SATKER	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan/Penurunan
1	Poltekbang Palembang	12,311,620,115.000	12,269,454,115	42,166,000
2	BP3KSDMT Pasir Jambu	11,121,123,835.000	11,121,123,835	-
3	Poltekpel Sumatera Barat	54,918,649,517.000	54,918,649,517	-
4	Pusbang Aparatur Phb	5,259,398,199.000	10,484,214,199	(5,224,816,000)
5	Pusbang Udara	13,944,717,110.000	1,077,067,110	12,867,650,000
6	Poltekpel Sulawesi Utara	37,654,851,449.000	37,654,851,449	-
7	Sekretariat BPSDMP	783,477,200.000	783,477,200	-
8	BP3 Curug	10,697,974,338.000	10,542,452,501	155,521,837
9	Poltekpel Banten	10,017,064,800.000	10,017,064,800	-
10	Poltrada Bali	54,059,518,407.000	56,384,911,074	(2,325,392,667)
11	Poltekpel Surabaya	999,037,464,818.000	94,649,286,950	904,388,177,868
12	Poltekbang Jayapura	37,253,648,731.000	38,543,280,695	(1,289,631,964)
13	Poltekbang Makassar	59,567,925,753.000	81,549,577,753	(21,981,652,000)
14	Poltekbang Medan	12,450,381,195.000	12,271,614,195	178,767,000
15	Poltekbang Surabaya	5,969,346,230.000	5,908,846,230	60,500,000
16	Poltektrans SDP Palembang	21,184,774,500.000	28,195,314,500	(7,010,540,000)
17	Poltekpel Sorong	58,042,983,683.000	58,042,983,683	-
18	Poltekpel Malahayati	15,925,503,543.000	13,881,751,415	2,043,752,128
19	Poltekpel Barombong	43,536,097,153.000	38,189,862,900	5,346,234,253
20	PTDI - STTD	9,297,638,095.000	9,431,835,095	(134,197,000)
21	BPPTL Jakarta	1,981,469,150.000	1,981,469,150	-
22	PIP Semarang	1,188,074,275.000	1,084,907,475	103,166,800
23	BP3IP Jakarta	759,542,748.000	759,542,748	-
24	STIP Jakarta	43,033,304,112.000	320,072,989,112	(277,039,685,000)
25	PKTJ Tegal	30,055,641,560.000	29,337,199,008	718,442,552
26	PIP Makassar	102,038,517,144.000	108,871,466,144	(6,832,949,000)
27	PPI Madiun	21,279,899,778.000	18,947,090,778	2,332,809,000
28	API Banyuwangi	28,518,996,692.000	23,536,999,692	4,981,997,000
29	PPI Curug	21,393,087,534.000	21,393,087,534	-
30	BPPTD Mempawah	43,510,808,181.000	42,872,863,181	637,945,000
JUMLAH		**1,766,793,499,845**	**1,154,775,234,038**	**612,018,265,807**

Mutasi Tambah Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan antara lain yang signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengadaan instalasi air minum asrama A, B dan C pada satker Poltekpel Surabaya senilai Rp599.197.500,- dan instalasi pipa hydrant kampus II sebesar Rp182.973.021,-;
2. Koreksi kesalahan input IP dapat ditampilkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Satker	Uraian Akun	Uraian Bidang	Uraian Transaksi	Nilai
1	PIP MAKASSAR	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	-
2	PIP MAKASSAR	Jalan dan Jembatan	JALAN DAN JEMBATAN	Koreksi Kesalahan input IP	- 6,832,949,000
3	PPSDMP UDARA	Jalan dan Jembatan	JALAN DAN JEMBATAN	Koreksi Kesalahan input IP	- 11,384,000
4	PPSDMP UDARA	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	12,879,034,000
5	PKTJ TEGAL	Jalan dan Jembatan	JALAN DAN JEMBATAN	Koreksi Kesalahan input IP	-
6	PKTJ TEGAL	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	-
7	STIP JAKARTA	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	- 277,039,685,000
8	PTDI STTD	Jalan dan Jembatan	JALAN DAN JEMBATAN	Koreksi Kesalahan input IP	- 21,434,000
9	PTDI STTD	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	- 112,763,000
10	POLTEKPEL BAROMBONG	Jalan dan Jembatan	JALAN DAN JEMBATAN	Koreksi Kesalahan input IP	2,509,554,000
11	PPSDM APARATUR PERHUBUNGAN	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	- 1,558,094,000
12	PPSDM APARATUR PERHUBUNGAN	Jalan dan Jembatan	JALAN DAN JEMBATAN	Koreksi Kesalahan input IP	- 3,666,722,000
13	POLTRANS SDP PALEMBANG	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	- 7,010,540,000
14	POLTEKBANG SURABAYA	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	-
15	POLTEKBANG SURABAYA	Jalan dan Jembatan	JALAN DAN JEMBATAN	Koreksi Kesalahan input IP	-
16	POLTEKBANG MEDAN	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	299,741,000
17	POLTEKBANG MEDAN	Jalan dan Jembatan	JALAN DAN JEMBATAN	Koreksi Kesalahan input IP	- 120,974,000
18	POLTEKBANG PALEMBANG	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	42,166,000
19	POLTEKBANG MAKASSAR	Jalan dan Jembatan	JALAN DAN JEMBATAN	Koreksi Kesalahan input IP	- 21,981,652,000
20	PPI MADIUN	Jalan dan Jembatan	JALAN DAN JEMBATAN	Koreksi Kesalahan input IP	577,815,000
21	POLTEKPEL SURABAYA	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	901,741,486,000
22	POLTRADA BALI	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	- 5,956,496,000
23	BP3 CURUG	Irigasi	BANGUNAN AIR	Koreksi Kesalahan input IP	- 38,485,000
				TOTAL	**593,698,618,000**

3. Terdapat penyelesaian pembangunan dengan KDP untuk jalan pada satker Poltekpel Barombong sebesar Rp2.836.680.253,-
4. Penyelesaian pembangunan dengan KDP pada Poltekpel Malahayati senilai Rp2.043.752.128,- berupa Jalan Khusus Komplek
5. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas pada 3 satker yaitu :
   - BPPTD Mempawah senilai Rp637.945.000,-;
   - Poltekbang Jayapura senilai (Rp1.289.631.964,-);
   - Poltrada Bali senilai (Rp507.310.667,-).
6. PPI Madiun terdapat Reklas Masuk Jaringan Transmisi Tegangan dibawah 100KVA sebesar Rp1.754.994.000,-;
7. Reklas dari aset Gedung Bangunan Laboratorium Permanen ke Jalan Khusus Lainnya atas rekomendasi BPK senilai Rp194.006.837 pada satker BP3 Curug.

Aset Tetap Lainnya Rp145.967.879.917,-

C.19. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp145.967.879.917,- dan Rp145.317.933.721,-. Rincian terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap Lainnya

NO	SATKER	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat BPSDM	3,026,377,210.	3,026,377,210	-
2	Poltekbang Palembang	494,403,568.	494,403,568	-
3	Pusbang Darat	1,040,834,678.	1,040,834,678	-
4	BP3KSDMT Pasir Jambu	2,570,230.	2,570,230	-
5	Poltekpel Sumatera Barat	5,926,674,776.	5,926,674,776	-
6	Pusbang Aparatur Phb	3,205,794,715.	3,205,794,715	-
7	Pusbang Laut	1,369,807,500.	1,728,107,308	(358,299,808)
8	Pusbang Udara	1,121,010,000.	1,121,010,000	-
9	Poltekpel Sulawesi Utara	7,097,748,060.	7,097,748,060	-
10	BP3 Curug	2,542,945,234.	2,542,945,234	-
11	Poltekpel Banten	7,016,623,951.	7,016,623,951	-
12	Poltrada Bali	4,158,015,060.	4,158,015,060	-
13	Poltekpel Surabaya	7,054,964,357.	6,963,107,357	91,857,000
14	Poltekbang Jayapura	1,120,737,824.	1,120,737,824	-
15	Poltekbang Makassar	4,152,968,850.	4,152,968,850	-
16	Poltekbang Medan	5,506,535,675.	5,581,291,675	(74,756,000)
17	Poltekbang Surabaya	2,087,738,151.	2,577,149,531	(489,411,380)
18	Poltektrans SDP Palembang	4,235,963,491.	4,235,963,491	-
19	Poltekpel Sorong	3,104,577,300.	3,815,295,207	(710,717,907)
20	Poltekpel Malahayati	4,804,678,730.	4,654,749,500	149,929,230
21	Poltekpel Barombong	3,048,746,617.	3,048,746,617	-
22	PTDI - STTD	8,369,682,585.	8,010,752,585	358,930,000
23	BPPTL Jakarta	711,071,030.	711,071,030	-
24	PIP Semarang	3,211,714,944.	2,894,569,944	317,145,000
25	BP3IP Jakarta	2,358,995,235.	2,352,995,235	6,000,000
26	STIP Jakarta	6,103,688,371.	5,987,242,871	116,445,500
27	PKTJ Tegal	4,562,754,645.	4,465,796,520	96,958,125
28	PIP Makassar	11,200,846,543.	11,243,128,777	(42,282,234)
29	PPI Madiun	3,656,157,850.	3,656,157,850	-
30	API Banyuwangi	2,160,740,908.	1,508,258,818	652,482,090
31	PPI Curug	31,512,511,829.	30,976,845,249	535,666,580
JUMLAH		**145,967,879,917**	**145,317,933,721**	**649,946,196**

Mutasi Aset Tetap Lainnya antara lain yang nilainya signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	145,317,933,721
Mutasi tambah:		
Saldo Awal		
Pembelian	Rp	1,701,973,310
Reklas Masuk	Rp	652,482,090
Hibah	Rp	6,000,000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp	96,958,125
Penyelesaian Pembangunan Langsung		
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar	Rp	(285,277,250)
Reklasifikasi Keluar		
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	(1,361,939,329)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	(160,250,750)
Saldo per 31 Desember 2019	**Rp**	**145,967,879,917**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Rp	21,455,336,731
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**Rp**	**124,512,543,186**

1. API Banyuwangi terdapat reklas masuk 1 Kapal Terbang sayap tetap mesin torak sebesar Rp652.482.090,- yang dijadikan tugu;
2. Pembelian buku perpustakaan pada Poltekpel Surabaya senilai Rp91.857.000,-;
3. Pembelian buku perpustakaan pada satker Poltekpel Malahayati Rp149.929.230,-;
4. Pembelian Buku perpustakaan pada STIP Jakarta senilai Rp116.445.500,-;
5. Reklas ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp 42.282.234,- pada PIP Makassar berdasarkan rekomendasi KAP.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp11.249.143.550,-

C.20. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.249.143.550,- dan Rp24.611.209.399,-. Rincian KDP Per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	SATKER	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan/Penurunan
1	Poltekbang Palembang	-	99.450.000	(99.450.000)
2	Pusbang Darat	574.365.000,	574.365.000	-
4	Pusbang Laut	9.063.960.000,	9.063.960.000	-
5	BP3 Curug	74.487.000,	74.487.000	-
6	Poltekpel Malahayati	-	-	-
7	STIP Jakarta	1.020.140.500,	1.020.140.500	-
8	PKTJ Tegal	436.831.550,	1.150.903.800	(714.072.250)
9	PIP Makassar	-	-	-
10	Poltrada Bali	-	972.113.900	(972.113.900)
11	Pusbang Aparatur Phb	79.359.500,	79.359.500	-
12	Poltekpel Barombong	-	11.576.429.699	(11.576.429.699)
13	BPPTD Mempawah	-	-	-
14	Poltekbang Medan	-	-	-
15	PPI Madiun	-	-	-
16	PTDI - STTD	-	-	-
17	Poltekpel Surabaya	-	-	-
18	Poltekpel Banten	-	-	-
19	BPPTL Jakarta	-	-	-
JUMLAH		**11.249.143.550**	**24.611.209.399**	**(13.362.065.849)**

Berikut adalah beberapa mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal pelaporan :

1. KDP satker Pusbang Darat merupakan Jasa Konsultan Penyusunan Master Plan Pembangunan BPPTD Makassar dengan nilai Rp574.365.000;
2. KDP Pusbang Laut terdiri dari:
   - Studi Kelayakan Maluku senilai Rp5.354.785.000,-;

- Studi Kelayakan NTT senilai Rp3.709.175.000,-.

3. KDP BP3 Curug senilai Rp74.487.000,- merupakan perkerasan lahan;
4. KDP satker STIP Jakarta senilai Rp1.020.140.500,- merupakan Perencanaan pembangunan gedung asrama perwira dan perencanaan renovasi auditorium dengan rincian sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Kontrak	Nilai KDP	kontrak	kontraktor
1	Perencanaan Pembangunan Gedung Asrama Perwira	Rp 806,327,500	Rp 810,047,500	001/KONT.PWA/V/STIP-16 tgl 31 Mei 2016	PT.YODYA KARYA
2	Perencanaan Renovasi Auditorium	Rp 207,033,000	Rp 210,093,000	001/KONT.AULA/V/STIP-16 tgl 27 Mei 2016	PT.CIPTA ADIWASTU
		Rp 1,013,360,500	Rp 1,020,140,500		

5. KDP PKTJ Tegal merupakan DED gedung kelas, DED gedung Lab MKTJ, DED Lab TKO, DED pembangunan workshop, DED renovasi gedung PKB dan DED pembangunan selasar dengan total nilai Rp436.831.550,-;
6. KDP Pusbang Aparatur Perhubungan merupakan perencanaan pembangunan gedung senilai Rp79.359.500,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap minus Rp6.421.686.468.556,-

C.21. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing minus Rp6.421.686.468.556,- dan minus Rp5.202.372.488.847,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.879.557.449.152	(5.526.482.869.150)	3.353.074.580.002
2	Gedung dan Bangunan	5.191.697.362.651	(319.641.054.190)	4.872.056.308.461
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.766.793.499.845	(554.145.608.285)	1.212.647.891.560
4	Aset Tetap Lainnya	145.967.879.917	(21.416.936.931)	124.550.942.986
	Total	**15.984.016.191.565**	**(6.421.686.468.556)**	**9.562.329.723.009**

Piutang Tagihan TP/TGR nilai Rp158.000.000,-

C.22. Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp158.000.000,- dan Rp184.000.000,-. Piutang Tagihan TP/TGR berasal dari pembebanan tuntutan ganti rugi terhadap saudara Ranap Parhusip sebesar Rp184.000.000,- sesuai SK Menteri Perhubungan Nomor KP 226 Tahun 2018 tentang Penetapan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Saudara Ranap Parhusip (Purna Bakti) tanggal 6 Februari 2018. Berdasarkan SK tersebut, cara pembayaran tuntutan ganti rugi ialah dengan pemotongan gaji pensiun serendah-rendahnya 50% sampai tuntutan ganti rugi tersebut lunas. Saudara Ranap Parhusip sudah membuat surat pernyataan bersedia membayar sebesar Rp2.000.000,- per bulan sampai dengan lunas.

Aset Lainnya nilai Rp240.371.159.982,-

Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp240.371.159.982,- dan Rp249.710.518.181,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan sebagai berikut:

Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Aset Tak Berwujud	311,337,186,814	317,073,966,332
2	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
3	Aset Lain-Lain	171,535,461,698	115,211,348,758
4	Aset Lainnya yang Belum Diregister	-	-
Jumlah		**482,872,648,512**	**432,285,315,090**
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya		- 242,501,488,530	- 182,574,796,909
Nilai Buku		**240,371,159,982**	**249,710,518,181**

Aset Tak Berwujud Rp311.337.186.814,-

C.23. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp311.337.186.814,- dan Rp317.073.966.332,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut :

Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	Hak Cipta	181,447,000
2	Software	180,166,758,903
3	Lisensi	5,525,359,920
4	Hasil Kajian/Penelitian	55,467,906,413
5	Aset Tak Berwujud Lainnya	69,995,714,578
Jumlah		**Rp 311,337,186,814**

Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker posisi 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NO	SATKER	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan / Penurunan
1	Sekretariat BPSDM	3,848,433,470	2,092,837,110	1,755,596,360
2	BP3 Palembang	2,006,538,000	2,006,538,000	-
3	Pusbang Darat	3,430,132,506	2,949,562,094	480,570,412
4	BP3KSDMT Bandung	406,330,000	406,330,000	-
5	Poltekpel Sumatera Barat	4,273,854,959	4,273,854,959	-
6	PPSDM Aparatur Phb	2,565,358,880	2,565,358,880	-
7	Pusbang Laut	3,212,462,800	2,723,540,300	488,922,500
8	Pusbang Udara	29,110,624,710	29,110,624,710	-
9	BDP Minahasa Selatan	1,118,340,000	1,118,340,000	-
10	BP3 Curug	2,341,383,200	2,057,862,000	283,521,200
11	BP2IP Mauk Tangerang	2,886,258,825	2,886,258,825	-
12	BP2TD Bali	3,419,090,500	3,295,810,200	123,280,300
13	Poltekpel Surabaya	5,097,048,857	4,810,311,857	286,737,000
14	BP3 Jayapura	4,886,945,906	4,886,945,906	-
15	ATKP Medan	18,861,007,225	17,188,585,525	1,672,421,700
16	Poltekbang Surabaya	766,795,000	766,795,000	-
17	Poltektrans SDP Palembang	4,789,531,900	4,646,531,900	143,000,000
18	BP2IP Malahayati Aceh	2,368,946,860	4,807,027,000	- 2,438,080,140
19	BP2IP Sorong	14,346,120,010	14,247,232,210	98,887,800
20	STTD Bekasi	11,547,111,330	11,547,111,330	-
21	BP2TL Jakarta	6,585,260,000	4,894,450,000	1,690,810,000
22	PIP Semarang	3,781,731,016	2,552,722,666	1,229,008,350
23	BP3IP Jakarta	30,806,928,556	30,806,928,556	-
24	STIP Jakarta	90,948,850,017	90,858,850,017	90,000,000
25	PKTJ Tegal	3,077,585,550	2,912,585,550	165,000,000
26	PIP Makassar	12,856,101,500	12,856,101,500	-
27	API Madiun	6,077,722,045	5,918,772,045	158,950,000
28	BP3 Banyuwangi	902,000,000	902,000,000	-
29	STPI Curug	34,246,757,192	44,469,717,192	- 10,222,960,000
30	BP2TD Mempawah	771,936,000	2,514,381,000	- 1,742,445,000
JUMLAH		**311,337,186,814**	**314,559,585,332**	**(5,736,779,518)**

Keterangan :

1. ATB Pusbang Darat meliputi :
   - Penyusunan DED Pembangunan BPPTD Makassar senilai Rp769.086.000,-

- Penyusunan Master Plan Pembangunan BPPTD Manokwari senilai Rp858.440.000,-
- Penyusunan DED Jaringan Jalan, Listrik, Saluran Air Bersih, dan Limbah BPPTD Makassar senilai Rp799.887.500,-
- Feasibility BPPTD Makassar senilai Rp591.555.000,-
- Modul Diklat PKB senilai Rp411.164.006,-,

2. Sekretariat BPSDM Perhubungan terdapat penyelesaian pembangunan dengan KDP aplikasi Big Data senilai Rp1.755.596.360,-,
3. BP3 Curug terdapat reklas masuk ATB senilai Rp283.521.200,- berupa software,
4. Penambahan berupa hasil kajian senilai Rp123.280.300,- pada Poltrada Bali,
5. Poltektrans SDP Palembang terdapat pembelian software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, kurikulum dan silabus untuk menunjang kegiatan pembelajaran bagi Taruna Program D III LLASDP senilai Rp143.000.000,-
6. Poltekpel Sorong terdapat reklas masuk software senilai Rp98.887.800,-
7. PPI Madiun terdapat penambahan ATB Software dari reklas masuk senilai Rp158.950.000,-
8. PPI Curug terdapat penurunan ATB dikarenakan dipindahkan ke ATB yang tidak digunakan dalam operasi senilai minus Rp10.222.960.000,-
9. BPPTD Mempawah terdapat reklas keluar berupa ATB Lainnya senilai minus Rp1.742.445.000,-
10. PIP Semarang terdapat pembelian software komputer senilai Rp1.234.033.350,- dan pengembalian belanja modal TAYL software senilai minus Rp5.025.000,-
11. BPPTL Jakarta terdapat reklas masuk Software CBT senilai Rp1.690.810.000,-
12. Poltekbang Medan terdapat penambahan ATB berupa DED Pengembangan Kampus senilai Rp1.672.421.700,-
13. Poltekpel Malahayati berupa penyelesaian pembangunan dengan KDP atas ATB lainnya senilai Rp323.969.360,-, Kapitalisasi ATB ke aset tetap senilai Rp2.762.049.500,- sesuai rekomendasi KAP;
14. Pusbang Laut terdapat pembelian hasil kajian dan software senilai Rp488.922.500,-
15. STIP Jakarta terdapat pembelian Aplikasi Ujian Keahlian Pelaut Taruna

senilai Rp90.000.000,-

16. PKTJ Tegal terdapat pembelian software senilai Rp165.000.000,-
17. Poltekpel Surabaya terdapat pembelian aplikasi pendaftaran poliklinik senilai Rp38.665.000,-, jasa konsultasi reviu gedung T senilai Rp99.957.000,-, pembuatan aplikasi SIAKAD senilai Rp99.000.000,-, dan pengembangan aplikasi keuangan senilai Rp49.115.000,-.

Aset Lain-lain Rp171.535.461.698,-

C.24. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp171.535.461.698,- dan Rp115.211.348.758,-. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pengembangan SDM Perhubungan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Rincian Aset Lain-Lain

NO	SATKER	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan / Penurunan
1	Sekretariat BPSDM	29,218,932,720	28,511,532,720	707,400,000
2	PPSDM Phb Darat	9,490,206,064	9,980,541,106	- 490,335,042
3	PPSDM Phb Udara	1,015,674,500	3,141,113,500	- 2,125,439,000
4	PPSDM Aparatur Phb	7,505,728,409	644,347,869	6,861,380,540
5	PPSDM Phb Laut	13,583,665,423	13,077,625,000	506,040,423
6	Poltekpel Banten	894,800,000	515,700,000	379,100,000
7	Poltrada Bali	1,312,230,900	1,750,000	1,310,480,900
8	Poltekpel Surabaya	1,945,145,700	2,441,737,800	(496,592,100)
9	Poltekbang Medan	1,765,007,700	200,054,000	1,564,953,700
10	Poltekbang Surabaya	4,449,237,777	516,269,000	3,932,968,777
11	Poltektrans SDP Palembang	3,779,829,176	3,838,129,176	(58,300,000)
12	Poltekpel Sorong	917,412,120	6,463,188,503	(5,545,776,383)
13	Poltekpel Barombong	4,968,276,303	2,106,312,100	2,861,964,203
14	PPI Madiun	1,270,365,950	-	1,270,365,950
15	Poltekpel Malahayati	65,483,000	463,748,500	(398,265,500)
16	PTDI - STTD	412,150,000	-	412,150,000
17	PIP Semarang	55,477,270,179	22,026,074,000	33,451,196,179
18	STIP Jakarta	3,602,888,110	3,602,888,110	-
19	PKTJ Tegal	3,527,743,580	3,527,743,580	-
20	PPI Curug	17,270,341,000	8,397,564,500	8,872,776,500
21	BP2TD Mempawah	-	1,223,450,800	(1,223,450,800)
22	Poltekbang Jayapura	311,695,223	28,285,000	283,410,223
23	Poltekbang Palembang	5,794,703,390	4,080,250,000	1,714,453,390
24	API Banyuwangi	-	423,043,494	(423,043,494)
25	PIP Makassar	2,956,674,474		
	JUMLAH	**171,535,461,698**	**115,211,348,758**	**53,367,438,466**

Keterangan :

1. PPSDMP Udara berupa penghentian BMN berupa software, ATB Lainnya dan Hasil Kajian senilai Rp.1.021.434.497,- dan penghapusan aset senilai minus Rp3.141.113.500,-
2. Poltekbang Medan, berupa penghentian atas 2 unit mini bus dan 1 mobil

ambulance dengan total nilai Rp708.680.000,- dan reklas dari aset tetap senilai Rp862.099.300,-

3. Poltekbang Surabaya merupakan penghentian atas berbagai macam aset antara lain LCD, Exhaust Fan, PC unit, Laptop, CPU, Printer, Alat Musik/Band, Monitor, Kursi Dorong, AC Split, Kasur/Spring Bed dan lainnya dengan total nilai Rp4.581.242.777,- dan penghapusan senilai Rp516.269.000,-
4. PPI Curug, berupa penambahan ATB yang tidak digunakan dalam operasi senilai Rp10.222.960.000 dan penambahan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi berupa Mess/Wisma senilai Rp1.530.204.000,- serta reklas keluar senilai minus Rp2.880.387.500,- berupa Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Torak,
5. Penambahan aset yang tidak digunakan berupa peralatan dan mesin senilai Rp1.311.000.900,- pada satker Poltrada Bali,
6. Poltekpel Banten penambahan aset yang tidak digunakan senilai Rp379.100.000,-
7. Poltekpel Surabaya terdapat penambahan aset yang tidak digunakan berupa kantin semi permanen senilai Rp138.777.000,- dan penghapusan 1 unit micro bus senilai minus Rp263.690.000,-, 1 unit minibus senilai minus Rp74.397.850,-, 2 unit sepeda motor senilai minus Rp25.800.000,-, 1 unit ambulance senilai minus Rp212.951.250,-, pagar permanen dan semi permanen senilai minus Rp58.530.000,-
8. PPI Madiun terdapat penghentiaan penggunaan 2 unit bus senilai Rp1.270.365.950,-
9. Sekretariat terdapat 3 unit mobil yang diusulkan untuk dihapus senilai Rp707.400.000,-,
10. Pusbang Darat terdapat penghentian aset dari penggunaan senilai Rp467.675.042,-
11. BPPTD Mempawah terdapat reklas keluar senilai minus Rp1.223.450.800,-
12. API Banyuwangi terdapat penghentian penggunaan mobil Toyota Hiace senilai minus Rp423.043.494,-
13. PIP Semarang terdapat reklas dari aset tetap berupa kapal latih senilai Rp25.668.660.158,-, Unit Alat Laboratorium Lainnya senilai Rp7.802.712.141,-, Propeller Forming Unit senilai Rp247.500.000,-, dan penghapusan software komputer senilai minus Rp281.215.000,-.
14. Reklas Masuk dari Peralatan dan Mesin dan Aset Tetal Lainnya ke Aset

tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp2.956.674.474,- pada PIP Makassar sesuai rekomendasi KAP;

15. Reklas ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan berupa barang rusak berat senilai Rp 2.861.964.203,- berdasarkan rekomendasi KAP pada satker POLTEKPEL Barombong;
16. Penghentian aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp570.499.240,- pada POLTEKPEL Sorong berdasarkan rekomendasi KAP.

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya minus Rp242.501.488.530,-

C.25. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing minus Rp242.501.488.530,- dan minus Rp182.574.796.909,-. Akumulasi Penyusutan / amortisasi Aset lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek Rp63.234.018.002,-

Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji sebesar Rp63.234.018.002,- dan Rp63.747.198.033,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada badan Pengembangan SDM Perhubungan per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Kewajiban Jangka Pendek	jumlah
1	Utang kepada pihak ketiga	Rp 44,769,163,517
2	Pendapatan diterima dimuka	Rp 18,464,854,485
3	Uang Muka dari KPPN	Rp -
4	Utang jangka pendek lainnya	Rp -
	TOTAL	**Rp 63,234,018,002**

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp44.769.163.517,-

C.26. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp44.769.163.517,- dan Rp35.740.993.336,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Satker	Uraian	31 Desember 2019	
1	Poltekpel Sorong	Saldo di Rekening Dana Kelola	Rp	2.315.149.834
2	Poltektrans SDP Palembang	Uang Makan para pegawai bulan Nopember dan Desember	Rp	63.621.000
3	Poltekpel Surabaya	Utang Perjadin	Rp	3.878.800
		Pendapatan sewa ruang Kas BNI yang belum disahkan	Rp	320.000.000
		Pembayaran PNBP Sertifikat pada Ditkapel	Rp	3.041.500
4	Poltekbang Medan	Saldo di rekening Dana Kelolaan	Rp	1.385.756
5	PIP Semarang	Utang Kegiatan Operasional (Honorarium)	Rp	3.332.235.650
		Utang Kegiatan non Operasional (Belanja Barang)	Rp	631.618.060
		Utang Kegiatan Operasional (Perjadin)	Rp	15.055.342
		Utang Kepada Pihak Ketiga BLU (Lap. Sepak Bola)	Rp	620.000
		Utang Kepada Pihak Ketiga BLU (Retur Revalidasi)	Rp	151.185.000
		Utang Kepada Pihak Ketiga BLU (DP Sewa Gedung GSG)	Rp	112.850.000
6	Poltekbang Surabaya	Biaya virtual account pembayaran taruna yang belum dipotong oleh pihak bank	Rp	6.000
7	Pusbang Aparatur	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp	99.043.140
8	Poltekpel Malahayati	Permakanan Taruna	Rp	470.827.500
		Diklat Keterampilan Pelaut	Rp	423.950.000
		UKP	Rp	17.490.000
		Giro Perbankan	Rp	4.231.608
		MCU	Rp	4.000.000
		Diklat Rating	Rp	26.400.000
9	PTDI - STTD	Beban Telepon	Rp	2.064.025
		Beban Listrik	Rp	263.632.402
		Beban Tunjangan Kinerja	Rp	28.272.843
		Beban Audit KAP	Rp	34.500.000
		Beban Gaji	Rp	4.481.432
		Beban Honor Diklat Transjakarta	Rp	1.528.425.000
		Belanja Bahan Diklat Transjakarta	Rp	483.557.000
10	PPI Curug	Beban Langganan Listrik dan Beban Pegawai	Rp	294.230.545
		Pendapatan yang telah diterima namun belum diketahui pengirimnya	Rp	997.776.600
11	API Banyuwangi	Saldo di rekening Dana Kelolaan	Rp	4.810.616.512
12	Poltekpel Tangerang	Saldo di rekening Dana Kelolaan	Rp	6.366.092.479
13	Poltekpel Barombong	Rekening Dana Kelolaan berupa dana titipan dari peserta diklat yang belum dilaksanakan	Rp	5.146.713.392
14	Poltekbang Makassar	Beban Listrik Desember	Rp	30.210.090
		Beban Telephon Desember	Rp	2.167.750
		Dana Pihak Ketiga BLU	Rp	94.436.003
15	PIP Makassar	Honor Pengujian Kesehatan Pelaut 19-30 Desember 2016	Rp	405.000
		Honor Pemeriksaan Kesehatan THT dan Mata 19-30 Desember 2016	Rp	7.440.000
		Honor Verifikasi Berkas Pemeriksaan Kesehatan THT dan Mata 19-30 Desember 2016	Rp	1.285.000
		Tunggakan Pembayaran Kapal Latih Tahun 2017	Rp	5.138.955.944
		Utang Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2019	Rp	50.669.800
		Utang Kepada Peserta Diklat yang sudah Membayar di periode 2019 yang belum ada penetapan	Rp	8.146.569.597
		Koreksi Hutang Kepada Pihak Ketiga berupa Tagihan Desember 2019 Langganan Air PDAM sebesar Rp3.770.140,- dan Telepon sebesar Rp4.427.900,- yang dibayarkan ditahun 2020. (KAP)	Rp	8.198.040
16	BP3 Curug	Saldo di rekening Dana Kelolaan	Rp	524.920.000
17	API Madiun	Beban Listrik	Rp	123.854.850
		Beban Langganan ASTINET	Rp	25.704.250
		Beban Telapon	Rp	358.786
		Belanja Barang Tahun 2019	Rp	1.780.693.200
18	BPPTL Jakarta	Saldo di rekening Dana Kelolaan	Rp	876.343.787
TOTAL			**Rp**	**44.769.163.517**

Pendapatan Diterima Dimuka Rp18.464.854.485-

C.27. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp18.464.854.485,- dan Rp28.004.378.397,-. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima satker di Lingkungan BPSDM Perhubungan, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No	Satker	Uraian	31 Desember 2019
1	PPI Madiun	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	1,079,233,333
		Pendapatan Sewa diterima dimuka untuk lahan ATM Bank Mandiri	46,500,000
2	Poltekbang Surabaya	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	3,789,489,515
3	API Banyuwangi	Pendapatan Sewa diterima dimuka untuk lahan ATM Bank Mandiri	7,753,424
4	Poltektrans SDP Palembang	Kelebihan jasa layanan Pendidikan 2019	161,788,000
		Pendapatan Sewa diterima dimuka untuk lahan ATM Bank Mandiri	57,500,000
5	BPPTL Jakarta	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dan Sewa Ruang ATM	564,180,000
6	PIP Semarang	Sewa ruangan oleh bank BRI	233,968,000
		Sewa Ruangan oleh Indomaret	97,461,000
7	STIP Jakarta	Jasa Layanan Diklat Keahlian Dan Keterampilan Pelaut	5,240,911,821
		Jasa Layanan Pendidikan Formal	3,027,290,001
		Jasa Layanan Penunjang Pendidikan	7,160,058
8	BP3IP Jakarta	Sewa ruangan kantor dan ATM gallery BNI	1,673,130,000
12	Poltekpel Surabaya	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka dari Pendidikan	2,389,156,000
		Pendapatan Sewa ruang ATM kampus I	60,000,000
		Pendapatan Sewa ruang ATM kampus II	29,333,333
TOTAL			**18,464,854,485**

Uang Muka dari KPPN Rp0,-

C.28. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp45.000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek lainnya Rp0,-

C.29. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,- dan Rp1.781.300,-. Utang Jangka Pendek

Lainnya tersebut merupakan utang pajak bendahara pengeluaran satker BP2IP Barombong yang belum disetorkan s.d tanggal 31 Desember 2019.

EKUITAS

Ekuitas Rp 18.239.775.271.544,-

C.30. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp18.239.775.271.544,- dan Rp19.226.042.314.130,-.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp 1.233.192.128.724,-

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp1.233.192.128.724,- dan Rp1.034.474.809.208,. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM (4241)	1.025.849.336.699	829.871.391.150	24%
PENDAPATAN HIBAH BLU (4242)	4.073.427.000	-	100%
PENDAPATAN HASIL KERJASAMA BLU(4243)	88.252.378.677	93.377.250.330	-5%
PENDAPATAN DARI ALOKASI APBN (4244)	29.829.112.028	38.299.096.813	-22%
PENDAPATAN BLU LAINNYA (4249)	50.135.169.602	43.687.987.525	15%
PENDAPATAN DARI PENJUALAN, PENGELOLAAN BMN, DAN IURAN BADAN USAHA (4251)	4.115.664.407	950.484.000	333%
PENDAPATAN PENDIDIKAN (4254)	30.510.517.228	15.384.180.913	98%
PENDAPATAN JASA LAINNYA (4256)	-	271.150	-100%
PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING, PERBANKAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (4257)	251.232	561.237	-55%
PENDAPATAN DENDA (4258)	425.429.405	12.889.956.339	-97%
PENDAPATAN LAIN-LAIN (4259)	842.446	13.629.751	-94%
JUMLAH PENDAPATAN	**1.233.192.128.724**	**1.034.474.809.208**	**19,21%**

Pendapatan – LO pada BPSDM Phb terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum, Kerjasama BLU, Pendapatan BLU Lainnya, Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening Perbankan, Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain.

Beban Pegawai Rp699.935.518.392,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp699.935.518.392,- dan Rp619.918.388.263,-Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
BEBAN GAJI POKOK PNS	130.975.087.199	121.802.940.184	8%
PENGEMBALIAN GAJI POKOK PNS	(49.245.180)	(57.759.100)	-15%
BEBAN PEMBULATAN GAJI PNS	2.149.230	1.799.555	19%
PENGEMBALIAN PEMBULATAN GAJI PNS	(193.435)	(29.800)	549%
BEBAN TUNJANGAN SUAMI(ISTRI) PNS	10.143.837.384	9.559.914.960	6%
PENGEMBALIAN TUNJANGAN SUAMI(ISTRI) PNS	(1.731.620)	(5.186.881)	-67%
BEBAN TUNJANGAN ANAK PNS	2.824.704.488	2.623.621.482	8%
PENGEMBALIAN TUNJANGAN ANAK PNS	(479.944)	(158.144)	203%
BEBAN TUNJANGAN STRUKTURAL PNS	2.637.010.000	2.490.775.288	6%
PENGEMBALIAN TUNJANGAN STRUKTURAL PN	(1.770.000)	(4.300.000)	-59%
BEBAN TUNJANGAN FUNGSIONAL PNS	6.408.777.000	6.337.261.220	1%
PENGEMBALIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL PN	(14.460.000)	(5.645.000)	156%
BEBAN TUNJANGAN PPH PNS	385.273.782	281.258.721	37%
PENGEMBALIAN TUNJANGAN PPH PNS	-	(339.436)	-100%
BEBAN TUNJANGAN BERAS PNS	6.772.026.140	6.602.959.370	3%
PENGEMBALIAN TUNJANGAN BERAS PNS	(1.448.400)	(724.200)	100%
BEBAN UANG MAKAN PNS	18.170.787.374	17.296.942.717	5%
PENGEMBALIAN UANG MAKAN PNS	(20.525.400)	-	-100%
BEBAN TUNJANGAN KHUSUS PAPUA PNS	449.070.000	338.835.000	33%
PENGEMBALIAN TUNJANGAN KHUSUS PAPUA	-	-	0%
BEBAN TUNJANGAN LAIN-LAIN TERMASUK UANG DUKA PNS DALAM DAN LUAR NEGERI	-	-	0%
BEBAN TUNJANGAN UMUM PNS	4.825.565.000	4.565.139.784	6%
PENGEMBALIAN TUNJANGAN UMUM PNS	(7.441.890)	(5.590.000)	33%
BEBAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN	9.528.226.300	9.630.687.100	-1%
PENGEMBALIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN	(2.929.100)	-	-100%
BEBAN UANG HONOR TETAP	-	-	0%
BEBAN UANG LEMBUR	7.007.661.732	10.544.727.500	-34%
PENGEMBALIAN BEBAN UANG LEMBUR	-	(115.700)	-100%
BEBAN PEGAWAI (TUNJANGAN KHUSUS KEGIA	118.200.095.802	114.034.203.091	4%
PENGEMBALIAN BEBAN PEGAWAI (TUNJANGAN KHUSUS KEGIATAN)	(52.738.867)	(50.679.460)	4%
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN	381.758.210.797	313.937.850.012	22%
JUMLAH BEBAN PEGAWAI	**699.935.518.392**	**619.918.388.263**	**13%**

Beban Jasa Rp 152.632.753.721,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp152.632.753.721,- dan Rp131.083.050.821,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, diantaranya yaitu Persediaan Konsumsi, Bahan Baku, dan Persediaan Lainnya. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
BEBAN PERSEDIAAN KONSUMSI	102.066.016.945	69.725.284.613	46%
BEBAN PERSEDIAAN AMUNISI	2.025.000	-	100%
BEBAN PERSEDIAAN PITA CUKAI MATERA	755.000	2.106.000	-64%
BEBAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU	37.456.910.283	54.472.907.879	-31%
BEBAN PERSEDIAAN LAINNYA	13.107.046.493	6.882.752.329	90%
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN	**152.632.753.721**	**131.083.050.821**	**16%**

Contoh barang persediaan konsumsi antara lain ATK dan obat-obatan baik untuk perkantoran maupun untuk diklat.

Beban Barang dan Jasa Rp 1.751.437.539.143,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.751.437.539.143,- dan Rp1.633.596.653.063,-. Beban Barang/Jasa adalah konsumsi atas barang/jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019		31 Desember 2018		NAIK (TURUN) %
BEBAN BARANG OPERASIONAL (5211)	Rp	211.247.793.086	Rp	219.479.260.247	-4%
BEBAN BARANG NON OPERASIONAL (5212)	Rp	814.449.520.788	Rp	766.759.931.619	6%
BEBAN JASA (5221)	Rp	146.358.562.985	Rp	104.923.502.413	39%
BEBAN BARANG BLU (525112)	Rp	443.711.146.894	Rp	358.007.344.466	24%
BEBAN JASA BLU (525113)	Rp	77.749.849.256	Rp	77.874.543.195	0%
BEBAN PENYEDIAAN BARANG JASA BLU LAINNYA (525119)	Rp	52.935.371.161	Rp	101.855.214.464	-48%
BEBAN BARANG BLU KEPADA BLU LAIN DALAM SATU KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (525141)	Rp	903.720.000	Rp	206.867.500	337%
BEBAN BARANG BLU KEPADA BLU LAIN YANG BERADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LAIN (525142)	Rp	-	Rp	440.000.000	-100%
BEBAN ASET EXTRACOMPTABLE PERALATAN DAN MESIN (595112)	Rp	4.059.074.973	Rp	3.798.636.249	7%
BEBAN ASET EXTRACOMPTABLE PERALATAN DAN MESIN BLU (595122)	Rp	-	Rp	251.352.910	-100%
BEBAN ASET EXTRACOMPTABLE GEDUNG DAN BANGUNAN BLU (595122)	Rp	22.500.000	Rp	-	100%
Jumlah Beban	**Rp**	**1.751.437.539.143**	**Rp**	**1.633.596.653.063**	**7%**

Peningkatan signifikan terjadi pada Beban Barang BLU Kepada BLU Lain Dalam Satu Kementerian/Lembaga (525141) senilai 337% dibanding periode tahun lalu.

Beban Pemeliharaan Rp 345.349.805.250,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp345.349.805.250,- dan Rp264.269.472.806,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
BEBAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	126.222.875.465	124.330.536.753	2%
BEBAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA	10.170.959.580	1.218.878.481	734%
BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	136.401.976.558	82.990.168.865	64%
BEBAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS (BMP) KHUSUS NON PERTAMINA	-	342.438.610	-100%
BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.038.368.931	285.999.973	962%
BEBAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	285.397.277	-	100%
BEBAN PEMELIHARAAN JARINGAN	2.002.406.977	939.244.648	113%
BEBAN PEMELIHARAAN LAINNYA	5.011.365.216	1.447.646.048	246%
BEBAN PEMELIHARAAN	42.097.715.016	33.909.374.140	24%
BEBAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU UNTUK PEMELIHARAAN	1.735.356.299	1.499.306.262	16%
BEBAN PERSEDIAAN SUKU CADANG	18.383.383.931	17.154.159.104	7%
BEBAN ASET EXTRACOMPTABLE GEDUNG & BANGUNAN	-	151.719.922	-100%
JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN	**345.349.805.250**	**264.269.472.806**	**31%**

Kenaikan terbesar dibanding periode sebelumnya terdapat pada Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 962%, atau senilai Rp2.752.368.958,-

Beban Perjalanan Dinas Rp 461.282.949.516,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp461.282.949.516,- dan Rp382.736.499.289,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
BEBAN PERJALANAN BIASA	Rp 271.511.805.982	Rp 198.775.356.969	37%
BEBAN PERJALANAN TETAP	Rp 18.958.552.940	Rp 23.544.983.541	-19%
BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Rp 3.647.410.864	Rp 3.790.907.593	-4%
BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	Rp 23.875.307.177	Rp 12.247.948.703	95%
BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	Rp 94.440.633.638	Rp 103.671.496.494	-9%
BEBAN PERJALANAN BIASA - LUAR NEGERI	Rp 635.558.487	Rp 41.745.584	1422%
BEBAN PERJALANAN LAINNYA - LUAR NEGERI	Rp 3.048.969.644	Rp 1.483.431.718	106%
BEBAN PERJALANAN	Rp 45.646.937.729	Rp 39.489.176.683	16%
PENGEMBALIAN BEBAN PERJALANAN	Rp (482.226.945)	Rp (308.547.996)	56%
JUMLAH BEBAN PERJALANAN	**Rp 461.282.949.516**	**Rp 382.736.499.289**	**20,52%**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 1.086.677.111.164,-

Perubahan signifikan terdapat pada Beban Biasa Luar Negeri yakni sebesar 1422% dibandingkan periode 31 Desember Tahun 2018.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.086.677.111.164,- dan Rp989.660.081.181,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	Rp 729.380.494.901	Rp 744.816.156.386	-2%
BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp 137.525.877.144	Rp 135.976.345.897	1,1%
BEBAN PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI, JARINGAN	Rp 203.957.650.026	Rp 86.539.578.153	136%
BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP LAINYA	Rp 2.339.246.067	Rp 2.752.298.627	-15%
BEBAN AMORTISASI	Rp 11.824.691.315	Rp 17.842.112.770	-34%
BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI	Rp 1.649.151.711	Rp 1.733.589.348	-5%
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**Rp 1.086.677.111.164**	**Rp 989.660.081.181**	**10%**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih minus Rp725.368.533,-

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar minus Rp725.368.533,- dan Rp5.843.298.816,. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019		31 Desember 2018		NAIK (TURUN) %
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG PNBP	Rp	-	Rp	(64.931.749)	-100%
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	Rp	25.983.967	Rp	6.133.451.612	-100%
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG BLU PELAYANAN PENDIDIKAN	Rp	(250.911.501)	Rp	(891.707.419)	-72%
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG BLU PENYEDIA BARANG JASA LAINNYA	Rp	(505.572.999)	Rp	664.102.156	-176%
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG SEWA PERALATAN & MESIN BLU	Rp	250.000	Rp	(265.000)	-194%
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG SEWA RUANGAN BLU	Rp	639.458	Rp	714.189	-10%
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG DARI KEG. NON OPERASIONAL BLU	Rp	4.242.542	Rp	1.935.027	119%
JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	**Rp**	**(725.368.533)**	**Rp**	**5.843.298.816**	**-112%**

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp7.983.754.787,-

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah senilai Rp7.983.754.787,- dan Rp31.416.392.568,- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ditampilkan sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019		31 Desember 2018		NAIK (TURUN) %
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR					
PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR	Rp	4.845.584.596	Rp	3.931.718.603	23%
BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR	Rp	(7.036.550.183)	Rp	(2.697.207.596)	161%
LAINNYA					
PENDAPATAN DARI KEG. NON OPERASIONAL LAINNYA	Rp	19.339.647.390	Rp	36.835.188.345	-47%
BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	Rp	(9.164.927.016)	Rp	(6.653.306.784)	38%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**Rp**	**7.983.754.787**	**Rp**	**31.416.392.568**	**-75%**

Pos Luar Biasa
Rp0,-

D.10. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	Rp -	-	-
Defisit Pos Luar Biasa	**Rp -**	**-**	**-**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp 19.226.042.314.130,-

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp19.226.042.314.130,- dan Rp18.754.118.760.556,-.

Surplus/(defisit) LO minus Rp 3.255.414.425.142,-

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah minus Rp3.255.414.425.142,- dan minus Rp2.961.216.242.463,-. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,-

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp0,- dan Rp0,-.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,-

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi atas nilai persediaan di periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,- dan Rp378.315.377,-.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

URAIAN	KOREKSI
-	0
TOTAL	-

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp93.716.328.880,-

E.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan bagian dari pos koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar pada LPE untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp93.716.328.880,- dan Rp0,-. Koreksi Atas Reklasifikasi tersebut digunakan untuk menyajikan akun Koreksi atas Reklasifikasi atas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (391151) yang dihasilkan dari Transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN dari Aplikasi Persediaan versi 19.0.1 dan SIMAK BMN versi 19.2.

Selisih Revaluasi Aset Tetap minus Rp110.573.423.333,-

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar minus Rp110.573.423.333,- dan Rp575.318.154.116,-.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi minus Rp241.393.380.366,-

E.3.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian Aset Tetap Non revaluasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar minus Rp241.393.380.366,- dan Rp9.270.921.239,-.

Koreksi Lain-lain Rp4.319.592.000,-

E.3.6. Koreksi Lain – lain

Lain-lain merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan dan transaksi lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.319.592.000,- dan minus Rp9.614.492.467,-.

Transaksi Antar Entitas Rp 2.523.078.265.375.-

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.523.078.265.375,- dan Rp2.857.786.897.772,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	NILAI
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	(44.301.972.964)
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	2.567.665.515.589
TRANSFER MASUK	49.555.598.691
TRANSFER KELUAR	(49.840.875.941)
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAYL	-
JUMLAH	**2.523.078.265.375**

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan yang melibatkan kas negara. Pada periode hingga 31 Desember 2019, nilai DDEL sebesar minus Rp44.301.972.964,-.

Nilai DDEL pada Neraca Percobaan sebesar minus Rp44.301.972.964,- sedangkan pada Realisasi Pendapatan di LRA sebesar Rp1.254.213.513.570,-. Terdapat perbedaan senilai Rp1.209.911.540.606,- yang merupakan seluruh nilai realisasi pendapatan BLU satker-satker dibawah BPSDM Perhubungan.

No	Akun	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.019.645.169.061
2	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga Pekerjaan Informasi Pelatihan dan	10.145.219.471
3	Pendapatan Penyediaan Barang	631.516.000
4	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1.975.012.152
5	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	36.325.000
6	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	96.765.048.101
7	Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	18.583.497.828
8	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	11.245.614.200
9	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	28.401.986.655
10	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	138.775.398
11	Pendapatan Lain-lain BLU	8.357.515.198
12	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	848.217.900
13	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	2.820.742.146
14	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	4.770.060.496
15	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	2.586.991.000
16	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	2.944.500.000
17	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	15.350.000
	Jumlah	**1.209.911.540.606**

E.4.2. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja yang melibatkan kas negara. Pada periode hingga 31 Desember 2019 nilai DKEL sebesar Rp2.567.665.515.589,-.

Nilai DKEL pada Neraca Percobaan sebesar Rp2.567.665.515.589,- sedangkan pada Realisasi Belanja di LRA sebesar Rp3.709.814.424.483,-. Terdapat perbedaan senilai minus Rp1.142.148.908.894,- yang merupakan seluruh nilai realisasi belanja BLU satker-satker dibawah BPSDM Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

No	Akun	Jumlah
1	Belanja Barang BLU	1.088.310.508.148
2	Belanja Modal BLU	53.838.400.746
	Jumlah	**1.142.148.908.894**

E.4.3. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp49.840.875.941,- terdiri dari:

NO	JENIS	ENTITAS ASAL	NILAI
1	PERALATAN DAN MESIN	API BANYUWANGI	3,396,684,810
		BP3 CURUG	281,680,000
		PPI MADIUN	522,148,594
		POLTEKPEL MALAHAYATI	45,036,635,287
		PPSDM PERHUBUNGAN UDARA	318,450,000
	JUMLAH		**49,555,598,691**

E.4.4. Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar minus Rp49.840.875.941,- yang terdiri dari :

NO	JENIS	ENTITAS PENERIMA	NILAI
1	PERALATAN DAN MESIN	PPI CURUG	3.396.684.810
		PPSDM PERHUBUNGAN UDARA	281.680.000
		PPSDM PERHUBUNGAN DARAT	522.148.594
		PPSDM PERHUBUNGAN LAUT	285.277.250
		STIP JAKARTA	45.036.635.287
	BP3 CURUG		318.450.000
	JUMLAH		**49.840.875.941**

Terdapat perbedaan nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar senilai Rp285.277.250,- pada Aset Tetap Renovasi berupa renovasi gedung dari PPSDMP Laut ke Eselon I lain yaitu Sekretariat Badan Litbang Perhubungan.

E.4.5. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang ataupun jasa. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,-.

Ekuitas Akhir Rp 18.239.775.271.544,-

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp18.239.775.271.544,- dan Rp19.226.042.314.130,-.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. PELAKSANAAN REVALUASI BARANG MILIK NEGARA

Pada tahun anggaran 2017 s.d 2018 Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah melaksanakan inventarisasi dan penilaian (revaluasi) Barang Milik Negara dan telah di input ke SIMAK BMN satker/UPT. Namun hasil audit BPK menyatakan hasil revaluasi belum memadai dan perlu ditindak lanjuti. Sehingga disepakati secara Tripartit antara BPK, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan untuk Laporan Keuangan Tahun 2018 akan dilaksanakan take out pada Neraca Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan.

Pada tahun anggaran 2019 dilakukan Re-Revaluasi BMN pada 28 Satker di Lingkungan BPSDM Perhubungan. Hasil revaluasi dan re-revaluasi BMN dilakukan take in pada Laporan Keuangan Satker pada periode semester II Tahun 2019.

F.2. PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

1. Poltekbang Medan

   Kelebihan pembayaran honorarium dan praktisi DPM 2019 senilai Rp662.901.000,- yang telah di setor ke kas negara dengan NTPN No: E9D471JNEPHNTDVV pada tanggal 19 Februari 2020;

2. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

   a) Denda Keterlambatan pekerjaan pembangunan Gedung TA 2019 senilai Rp18.363.853,- yang telah disetor ke kas negara dengan NTPN No. 0F6FD1JNEPF48QSL tgl 31 Januari 2020;

   b) Kelebihan Belanja Gedung Bangunan TA 2019 senilai Rp78.604.106,- yang telah disetor ke kas negara dengan NTPN No F875C55DE3OJRLED tgl 30 Januari 2020.

3. PKTJ Tegal

   Kelebihan Pembayaran Kelebihan pembayaran honorarium DPM Tahun 2019 senilai Rp309.150.000,- yang telah disetor ke kas negara dengan NTPN No 8DF173CIEEJKKGUJ pada tanggal 22 Januari 2020;

4. BP3 Curug

Pengembalian kelebihan belanja modal gedung HLO senilai Rp97.867.613,- yang telah disetor ke kas negara dengan NTPN No. 651F67QLTJO1O21M pada tanggal 9 April 2020;

5. POLTRANS SDP Palembang

Kelebihan Pembayaran Kelebihan pembayaran honorarium DPM Tahun 2019 senilai Rp200.497.500,- yang telah disetor ke kas negara dengan NTPN No D1D3355DE3TQRDJN pada tanggal 4 Maret 2020.

F.3. JURNAL TIDAK LAZIM

Pada tahun 2019, terdapat beberapa jurnal yang dianggap tidak lazim dalam Laporan Keuangan BPSDM Perhubungan. Jurnal-jurnal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	nggal Dokum	Akun	Debet	Kredit
1	API BANYUWANGI	31/12/2019	117911	-	12,328,800
2	PIP MAKASSAR	31/10/2019	132211	-	181,467,000
3	PPI CURUG	30/06/2019	132211	385,000,000	-
4	PKTJ TEGAL	31/12/2019	117911	-	24,992,000
5	PKTJ TEGAL	31/12/2019	134213	346,518,842	-
6	PKTJ TEGAL	31/12/2019	136111	-	22,500,000
7	PKTJ TEGAL	31/12/2019	132211	-	165,000,000
8	PKTJ TEGAL	31/12/2019	132211	-	199,150,710
9	PKTJ TEGAL	31/12/2019	132211	-	198,360,000
10	PKTJ TEGAL	31/12/2019	117911	-	8,388,000
11	PKTJ TEGAL	31/12/2019	117911	-	92,353,137
12	PKTJ TEGAL	31/12/2019	117911	-	7,446,500
13	PKTJ TEGAL	31/12/2019	117911	7,050,000	-
14	PKTJ TEGAL	31/12/2019	117911	55,036,910	-
15	PKTJ TEGAL	31/12/2019	133211	208,761,760	-
16	PKTJ TEGAL	31/12/2019	133211	198,360,000	-
17	PKTJ TEGAL	31/12/2019	134213	199,150,710	-
18	PKTJ TEGAL	31/12/2019	134211	172,773,000	-
19	STIP	31/12/2019	132211	158,287,800	-
20	STIP	31/12/2019	133211	1,162,121,000	-
21	STIP	31/12/2019	133211	92,477,000	-
22	STIP	31/12/2019	117911	-	2,500,000
23	STIP	31/12/2019	132211	639,400,000	-
24	STIP	31/12/2019	132211	52,030,000	-
25	STIP	31/12/2019	132211	189,200,000	-
26	STIP	31/12/2019	132211	158,287,800	-
27	STIP	31/12/2019	132211	2,500,000	-
28	STIP	31/10/2019	132211	-	330,000,000
29	STIP	31/10/2019	132211	-	199,760,000
30	STIP	31/12/2019	132211	-	42,780,000
31	STIP	31/12/2019	132211	-	40,200,000
32	STIP	31/12/2019	132211	2,420,000	-
33	STIP	31/12/2019	132211	93,607,800	-
34	STIP	31/12/2019	132211	-	90,000,000

No	Satuan Kerja	Tanggal Dokumen	Akun	Debet	Kredit
35	BP3IP	28/08/2019	132211	493,000,000	-
36	PIP SEMARANG	31/12/2019	117911	-	53,003,500
37	PIP SEMARANG	31/12/2019	117911	150,000	-
38	PIP SEMARANG	30/09/2019	132211	1,386,000	-
39	PIP SEMARANG	30/09/2019	117911	-	1,386,000
40	PIP SEMARANG	31/12/2019	132211	-	36,990,000
41	PIP SEMARANG	31/12/2019	132211	-	79,100,000
42	PIP SEMARANG	31/12/2019	132211	-	44,137,200
43	PIP SEMARANG	30/11/2019	132211	-	975,000
44	PIP SEMARANG	31/10/2019	132211	-	8,839,320
45	PIP SEMARANG	30/09/2019	132211	-	970,000
46	PIP SEMARANG	30/09/2019	132211	-	2,550,000
47	PIP SEMARANG	31/10/2019	132211	-	35,189,000
48	PIP SEMARANG	30/09/2019	117911	-	7,040,000
49	PIP SEMARANG	31/12/2019	117911	94,165	-
50	PIP SEMARANG	31/12/2019	132211	-	550,000
51	PIP SEMARANG	31/12/2019	132211	27,500,000	-
52	PIP SEMARANG	31/12/2019	132211	-	7,044,400
53	PIP SEMARANG	31/12/2019	132211	-	150,000
54	PIP SEMARANG	31/12/2019	132211	-	91,172,400
55	PIP SEMARANG	31/12/2019	132211	-	4,950,000
56	PIP SEMARANG	30/09/2019	132211	-	59,184,000
57	PIP SEMARANG	30/09/2019	132211	91,300,000	-
58	PIP SEMARANG	31/12/2019	134213	7,044,400	-
59	PIP SEMARANG	31/12/2019	134213	4,950,000	-
60	PIP SEMARANG	31/12/2019	117911	-	18,502,000
61	PIP SEMARANG	31/12/2019	134213	91,172,400	-
62	PIP SEMARANG	31/12/2019	117911	-	27,500,000
63	PIP SEMARANG	30/09/2019	132211	7,040,000	-
64	BP2TL	31/12/2019	133211	-	185,121,500
65	BP2TL	31/12/2019	133211	993,000,000	-
66	BP2TL	31/12/2019	133211	-	74,081,700
67	BP2TL	31/12/2019	132211	74,081,700	-
68	BP2TL	31/12/2019	132211	185,121,500	-
69	BP2TL	30/09/2019	132211	-	156,000,000
70	BP2TL	31/12/2019	132211	-	49,200,000
71	PTDI STTD	31/12/2019	132211	-	752,960,000
72	POLTEKPEL BAROMBONG	31/05/2019	132211	236,100,000	-
73	POLTEKPEL BAROMBONG	31/07/2019	132211	-	26,829,000
74	POLTEKPEL BAROMBONG	31/07/2019	132211	-	29,700,000
75	POLTEKPEL BAROMBONG	31/07/2019	132211	-	24,750,000
76	POLTEKPEL BAROMBONG	31/05/2019	132211	-	178,750,000
77	POLTEKPEL BAROMBONG	31/05/2019	132211	-	184,250,000
78	POLTEKPEL BAROMBONG	31/05/2019	132211	1,141,700,000	-
79	POLTEKPEL SUMATERA BARAT	31/05/2019	132211	-	4,928,000

No	Satuan Kerja	Tanggal Dokumen	Akun	Debet	Kredit
80	POLTEKPEL MALAHAYATI ACEH	31/05/2019	134211	49,736,500	-
81	POLTEKPEL MALAHAYATI ACEH	31/08/2019	134211	49,799,200	-
82	POLTEKPEL MALAHAYATI ACEH	31/05/2019	133211	-	49,736,500
83	POLTEKPEL MALAHAYATI ACEH	31/08/2019	133211	-	49,799,200
84	POLTEKPEL MALAHAYATI ACEH	31/12/2019	132211	-	840,000
85	POLTEKPEL MALAHAYATI ACEH	31/07/2019	132211	-	231,000,000
86	POLTRANS SDP PALEMBANG	30/06/2019	132211	-	179,850,000
87	POLTRANS SDP PALEMBANG	30/09/2019	132211	-	155,001,000
88	POLTRANS SDP PALEMBANG	31/12/2019	132211	-	78,540,000
89	POLTEKBANG SURABAYA	30/09/2019	132211	-	127,428,000
90	POLTEKBANG SURABAYA	30/11/2019	132211	127,428,000	-
91	POLTEKBANG SURABAYA	31/12/2019	134211	-	60,500,000
92	POLTEKBANG SURABAYA	30/09/2019	133211	127,428,000	-
93	POLTEKBANG SURABAYA	30/11/2019	133211	-	127,428,000
94	POLTEKBANG SURABAYA	30/09/2019	132211	-	61,905,000
95	POLTEKBANG SURABAYA	31/12/2019	134213	60,500,000	-
96	POLTEKBANG MEDAN	31/10/2019	136111	-	1,667,871,700
97	POLTEKBANG PALEMBANG	31/07/2019	132211	-	6,072,000
98	POLTEKBANG PALEMBANG	30/09/2019	117911	-	8,951,850
99	PPI MADIUN	31/12/2019	133211	929,889,897	-
100	PPI MADIUN	30/06/2019	133211	-	48,569,573
101	PPI MADIUN	31/12/2019	132211	1,899,756,400	-
102	PPI MADIUN	30/06/2019	132211	48,569,573	-
103	POLTEKPEL SURABAYA	31/12/2019	133211	38,413,540	-
104	POLTEKPEL SURABAYA	31/12/2019	134213	2,646,691,868	-
105	POLTEKPEL SURABAYA	31/12/2019	134211	-	2,646,691,868
106	POLTEKPEL SURABAYA	31/12/2019	132211	60,918,000	-
107	POLTEKPEL SURABAYA	31/12/2019	132211	121,096,492	-
108	POLTEKPEL SURABAYA	31/12/2019	132211	-	133,650,000
109	POLTEKPEL SURABAYA	31/12/2019	117911	344,655,600	-
110	POLTEKPEL SURABAYA	31/12/2019	132211	8,910,000	-
111	POLTRADA BALI	30/09/2019	132211	-	254,320,000
112	POLTRADA BALI	15/10/2019	132211	-	108,363,200
113	POLTRADA BALI	30/06/2019	132211	-	21,420,000
114	POLTRADA BALI	31/08/2019	132211	-	3,080,000
115	POLTRADA BALI	31/12/2019	132211	-	27,635,253
116	POLTRADA BALI	10/11/2019	132211	-	19,000,000
117	POLTEKPEL BANTEN	01/06/2019	132211	-	248,589,000
118	POLTEKPEL BANTEN	31/07/2019	132211	-	38,940,000
119	POLTEKPEL BANTEN	01/03/2019	132211	647,650,000	-
120	POLTEKPEL BANTEN	31/10/2019	132211	162,977,000	-

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SUGIHARDJO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Unit Eselon I : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
per 31 Desember 2019

No.	Klasifikasi Piutang	Saldo Awal 31 Desember 2018		Perubahan Tahun 2019 (+/-)		Saldo Akhir 31 Desember 2019		Penggolongan					Nilai Angunan atau Barang Sitaan (Rp)
		Jumlah Debitor	Nilai (Rp)	Jumlah Debitor	Nilai (Rp)	Jumlah Debitor	Nilai (Rp)	Tidak Disishkan/ Temuan BPK RI (Rp)	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
A.	PNBP	12	7,524,117,324	(1)	481,088,101	11	8,005,205,425	1,804,831,924	15,047,793	-	51,114,888	6,134,210,820	
	Sub Jumlah A	**12**	**7,524,117,324**	**(1)**	**481,088,101**	**11**	**8,005,205,425**	**1,804,831,924**	**15,047,793**	**-**	**51,114,888**	**6,134,210,820**	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih A						**6,159,843,503**	**-**	**75,239**	**-**	**25,557,444**	**6,134,210,820**	
B.	Piutang Lainnya Dari Operasional BLU	1,809	29,685,055,858	277	(9,488,608,436)	2086	20,196,447,422	-	16,392,539,122	2,378,471,800	245,096,000	1,180,340,500	-
	Sub Jumlah B	**1,809**	**29,685,055,858**	**277**	**(9,488,608,436)**	**2,086**	**20,196,447,422**	**-**	**16,392,539,122**	**2,378,471,800**	**245,096,000**	**1,180,340,500**	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih B						**1,622,698,376**	**-**	**81,962,696**	**237,847,180**	**122,548,000**	**1,180,340,500**	
C.	Piutang Lainnya Dari Non Operasional BLU	15	863,172,748	7	771,404,801	22	1,634,577,549	19,200,000	1,571,042,549	44,335,000	-	-	-
	Sub Jumlah C	**15**	**863,172,748**	**7**	**771,404,801**	**22**	**1,634,577,549**	**19,200,000**	**1,571,042,549**	**44,335,000**	**-**	**-**	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih C						**12,288,713**	**-**	**7,855,213**	**4,433,500**	**-**	**-**	
D.	Piutang Jangka Panjang Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1	184,000,000	-	(26,000,000)	1	158,000,000	158,000,000	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah D	**1**	**184,000,000**	**-**	**(26,000,000)**	**1**	**158,000,000**	**158,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih D						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Jumlah Total (A+B+C+D)	**1,837**	**38,256,345,930**	**283**	**(8,262,115,534)**	**2,120**	**29,994,230,396**	**1,982,031,924**	**17,978,629,464**	**2,422,806,800**	**296,210,888**	**7,314,551,320**	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (A+B+C+D)						**7,794,830,591**	**-**	**89,893,147**	**242,280,680**	**148,105,444**	**7,314,551,320**	

JAKARTA, 2020
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SUGIHARDJO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Unit Eselon I : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
per 31 Desember 2019

No.	Klasifikasi Piutang	Saldo Awal 31 Desember 2018		Perubahan tahun 2019 (+/-)		Saldo Akhir 31 Desember 2019		Penggolongan					Nilai Angunan atau Barang Sitaan (Rp)
		Jumlah Debitor	Nilai (Rp)	Jumlah Debitor	Nilai (Rp)	Jumlah Debitor	Nilai (Rp)	Tidak Disishkan/ Temuan BPK RI (Rp)	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
A.	**PIUTANG BUKAN PAJAK**												
	PNBP												-
1	PIP Makassar	1	6,134,210,820	-	-	1	6,134,210,820		-	-	-	6,134,210,820	-
2	Poltekbang Medan	3	412,708,095	(2)	250,192,905	1	662,901,000	662,901,000	-	-	-	-	-
3	Poltekpel Sumatera Barat	1	696,413,000	(1)	(696,413,000)	-	-		-	-	-	-	-
4	API Banyuwangi	1	2,642,772	1	60,800,916	2	63,443,688		12,328,800	-	51,114,888	-	-
5	Poltrada Bali	1	81,960,750	-	425,349,918	1	507,310,668	507,310,668	-	-	-	-	-
6	BPPTD Mempawah	3	133,533,700	(3)	(133,533,700)	-	-		-	-	-	-	-
7	PIP Semarang	1	31,232,000	(1)	(31,232,000)	-	-		-	-	-	-	-
8	PPSDM Perhubungan Darat	-	-	1	24,000,000	1	24,000,000	24,000,000					
9	STIP Jakarta	1	31,416,187	(1)	(31,416,187)	-	-		-	-	-	-	-
10	BP3IP Jakarta	-	-	1	2,718,993	1	2,718,993		2,718,993	-	-	-	
11	PPI Madiun	-	-	1	96,967,959	1	96,967,959	96,967,959	-	-	-	-	-
12	Poltektrans SDP Palembang	-	-	1	200,497,500	1	200,497,500	200,497,500	-	-	-	-	-
13	PKTJ Tegal	-	-	1	309,150,000	1	309,150,000	309,150,000	-	-	-	-	-
14	Poltekbang Surabaya	-	-	1	4,004,797	1	4,004,797	4,004,797	-	-	-	-	-
							-				-	-	-
	Sub Jumlah A	**12**	**7,524,117,324**	**(1)**	**481,088,101**	**11**	**8,005,205,425**	**1,804,831,924**	**15,047,793**	**-**	**51,114,888**	**6,134,210,820**	**-**
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih A							**-**	**75,239**	**-**	**25,557,444**	**6,134,210,820**	
	PIUTANG LAINNYA												
B.	**Dari Operasional BLU**									-	-	-	-
												-	-
1	STIP Jakarta	25	536,709,000	(11)	(371,534,000)	14	165,175,000		165,175,000	-	-	-	-
2	Poltekbang Makassar	1	653,460,000	18	(283,682,000)	19	369,778,000		369,778,000	-	-	-	-
3	Poltekbang Surabaya	11	3,172,618,950	36	1,225,473,049	47	4,398,091,999		4,398,091,999	-	-	-	-
4	Poltekpel Surabaya	0	-	106	467,347,000	106	467,347,000		467,347,000	-	-	-	-
5	PIP Makassar	7	10,945,000	-	(3,671,000)	7	7,274,000		-	-	-	7,274,000	-
6	Poltekpel Barombong	20	24,000,000	20	168,858,000	40	192,858,000	-	192,858,000	-	-	-	-
7	Poltekbang Medan	108	1,234,553,551	(100)	196,185,565	8	1,430,739,116	-	455,989,316	974,749,800	-	-	-
8	PPI Madiun	146	4,329,911,800	(55)	(3,323,240,383)	91	1,006,671,417	-	1,006,671,417	-	-	-	-
9	Poltekpel Malahayati	345	1,165,460,000	(234)	(296,105,000)	111	869,355,000		675,473,000	193,882,000	-	-	-
10	Poltekbang Palembang	0	-	1	223,800,000	1	223,800,000		-	-	-	223,800,000	-
11	PIP Semarang	113	450,290,000	336	209,014,000	449	659,304,000		659,304,000	-	-	-	-
12	Poltekpel Sorong	30	884,178,500	175	(755,028,500)	205	129,150,000		129,150,000	-	-	-	-
13	Poltektrans SDP Palembang	20	44,318,000	(20)	(44,318,000)	-	-		-	-	-	-	-
14	Poltekpel Banten	0	-	73	476,247,600	73	476,247,600		476,247,600	-	-	-	-
15	PTDI - STTD	261	1,022,051,456	(159)	2,031,983,324	102	3,054,034,780		3,054,034,780	-	-	-	-
16	PPI Curug	123	13,203,189,825	1	(10,253,076,075)	124	2,950,113,750		597,711,250	1,162,040,000	241,096,000	949,266,500	-
17	PKTJ Tegal	597	1,337,100,000	86	(180,410,000)	683	1,156,690,000		1,104,890,000	47,800,000	4,000,000	-	-
18	BPPTL Jakarta	1	891,000,000	(1)	(891,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	
19	BP3 Curug	1	725,269,776	3	1,321,547,984	4	2,046,817,760		2,046,817,760	-	-	-	-
20	BP3IP Jakarta	0	-	2	593,000,000	2	593,000,000		593,000,000	-	-	-	-
	Sub Jumlah B	**1,809**	**29,685,055,858**	**277**	**(9,488,608,436)**	**2,086**	**20,196,447,422**	**-**	**16,392,539,122**	**2,378,471,800**	**245,096,000**	**1,180,340,500**	**-**
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih B							**-**	**81,962,696**	**237,847,180**	**122,548,000**	**1,180,340,500**	

No.	Klasifikasi Piutang	Saldo Awal 31 Desember 2018		Perubahan tahun 2019 (+/-)		Saldo Akhir 31 Desember 2019		Penggolongan					Nilai Angunan atau Barang Sitaan (Rp)
		Jumlah Debitor	Nilai (Rp)	Jumlah Debitor	Nilai (Rp)	Jumlah Debitor	Nilai (Rp)	Tidak Disishkan/ Temuan BPK RI (Rp)	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
C.	**Dari Operasional Non BLU**												
1	STIP JAKARTA	7	26,397,791	(5)	(20,471,601)	2	5,926,190		5,926,190	-	-	-	-
2	Poltekbang Medan	3	152,354,757	1	(116,919,757)	4	35,435,000		24,600,000	10,835,000	-	-	-
3	Poltektrans SDP Palembang	0	-	1	5,475,890	1	5,475,890		5,475,890	-	-	-	-
4	Poltekpel Malahayati	1	11,830,200	-	1,726,200	1	13,556,400		13,556,400	-	-	-	-
5	Poltekbang Surabaya	1	121,750,000	-	(115,350,000)	1	6,400,000		6,400,000	-	-	-	-
6	PTDI - STTD	2	508,000,000	-	711,200,000	2	1,219,200,000	19,200,000	1,200,000,000	-	-	-	
7	PIP Semarang	0	-	7	72,899,500	7	72,899,500		72,899,500	-	-	-	-
8	BP3IP Jakarta	1	42,840,000	2	139,844,569	3	182,684,569		149,184,569	33,500,000	-	-	-
9	BP3 Curug	0	-	1	93,000,000	1	93,000,000		93,000,000	-	-	-	-
	Sub Jumlah C	**15**	**863,172,748**	**7**	**771,404,801**	**22**	**1,634,577,549**	**19,200,000**	**1,571,042,549**	**44,335,000**	**-**	**-**	**-**
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih C							**-**	**7,855,213**	**4,433,500**	**-**	**-**	
D.	**PIUTANG JANGKA PANJANG**												
	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi												
1	PPSDM Perhubungan Darat	1	184,000,000	-	(26,000,000)	1	158,000,000	158,000,000	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah D	**1**	**184,000,000**	**-**	**(26,000,000)**	**1**	**158,000,000**	**158,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih D							**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Jumlah Total (A+B+C+D)	**1,837**	**38,256,345,930**	**283**	**(8,262,115,534)**	**2,120**	**29,994,230,396**	**1,982,031,924**	**17,978,629,464**	**2,422,806,800**	**296,210,888**	**7,314,551,320**	**-**
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (A+B+C+D)							**-**	**89,893,147**	**242,280,680**	**148,105,444**	**7,314,551,320**	**-**

JAKARTA, 2020

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SUGIHARDJO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

Laporan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Unit Eselon I : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
per 31 Desember 2019

NO	Klasifikasi Piutang	Saldo Awal 31 Desember 2018 (Audited)	Penambahan Piutang Tahun 2019	Pelunasan atas Piutang Tahun 2019	Pelunasan atas Piutang 2018	Saldo per 31 Desember 2019
A.	**PIUTANG BUKAN PAJAK**					
	PNBP					
1	PIP Makassar	6,134,210,820	-	-	-	6,134,210,820
2	Poltekbang Medan	412,708,095	662,901,000	-	412,708,095	662,901,000
3	Poltek Sumatera Barat	696,413,000	-	-	696,413,000	-
4	API Banyuwangi	2,642,772	63,443,688	-	2,642,772	63,443,688
5	Poltrada Bali	81,960,750	507,310,668	-	81,960,750	507,310,668
6	BPPTD Mempawah	133,533,700	-	133,533,700	-	-
7	PIP Semarang	31,232,000	-	-	31,232,000	-
8	PPSDM Perhubungan Darat	-	36,000,000	12,000,000		24,000,000
9	STIP Jakarta	31,416,187	-	-	31,416,187	-
10	BP3IP Jakarta	-	2,718,993	-	-	2,718,993
11	PPI Madiun	-	96,967,959	-	-	96,967,959
12	Poltektrans SDP Palembang	-	200,497,500	-	-	200,497,500
13	PKTJ Tegal	-	309,150,000	-	-	309,150,000
14	Poltekbang Surabaya	-	4,004,797	-	-	4,004,797
						-
	Jumlah Sub A	**7,524,117,324**	**1,882,994,605**	**145,533,700**	**1,256,372,804**	**8,005,205,425**
B.	**PIUTANG DARI KEG. OPERASIONAL BLU**					
1	STIP Jakarta	536,709,000	1,240,870,000	1,075,695,000	536,709,000	165,175,000
2	Poltekbang Makassar	653,460,000	369,778,000	-	653,460,000	369,778,000
3	Poltekbang Surabaya	3,172,618,950	5,279,764,999	881,673,000	3,172,618,950	4,398,091,999
4	Poltekpel Surabaya	-	933,749,000	466,402,000	-	467,347,000
5	PIP Makassar	10,945,000	89,940,000	82,666,000	10,945,000	7,274,000
6	Poltekpel Barombong	24,000,000	192,858,000	-	24,000,000	192,858,000
7	Poltekbang Medan	1,234,553,551	14,420,993,616	12,990,254,500	1,234,553,551	1,430,739,116
8	PPI Madiun	4,329,911,800	4,192,092,017	3,185,420,600	4,329,911,800	1,006,671,417
9	Poltekpel Malahayati	1,165,460,000	941,824,000	72,469,000	1,165,460,000	869,355,000
10	Poltekbang Palembang	-	4,485,816,000	4,262,016,000	-	223,800,000
11	PIP Semarang	450,290,000	1,118,182,000	458,878,000	450,290,000	659,304,000
12	Poltekpel Sorong	884,178,500	129,150,000	-	884,178,500	129,150,000

13	Poltektrans SDP Palembang	44,318,000	7,140,000	7,140,000	44,318,000	-
14	Poltekpel Banten	-	476,247,600	-	-	476,247,600
15	PTDI - STTD	1,022,051,456	21,071,988,200	18,017,953,420	1,022,051,456	3,054,034,780
16	PPI Curug	13,203,189,825	77,710,809,448	75,770,958,898	12,192,926,625	2,950,113,750
17	PKTJ Tegal	1,337,100,000	1,123,790,000	-	1,304,200,000	1,156,690,000
18	BPPTL Jakarta	891,000,000	-	-	891,000,000	-
19	BP3 Curug	725,269,776	2,951,469,770	904,652,010	725,269,776	2,046,817,760
20	BP3IP Jakarta	-	593,000,000	-	-	593,000,000
						-
	Sub Jumlah B	**29,685,055,858**	**137,329,462,650**	**118,176,178,428**	**28,641,892,658**	**20,196,447,422**
C.	**PIUTANG DARI KEGIATAN OP. NON BLU**					
1	STIP Jakarta	26,397,791	144,091,548	138,165,358	26,397,791	5,926,190
2	Poltekbang Medan	152,354,757	6,250,000	1,750,000	121,419,757	35,435,000
3	Poltektrans SDP Palembang	-	5,475,890	-	-	5,475,890
4	Poltekpel Malahayati	11,830,200	13,556,400	-	11,830,200	13,556,400
5	Poltekbang Surabaya	121,750,000	6,400,000	-	121,750,000	6,400,000
6	PTDI - STTD	508,000,000	1,219,200,000	-	508,000,000	1,219,200,000
7	PIP Semarang	-	72,899,500	-	-	72,899,500
8	BP3IP Jakarta	42,840,000	524,047,069	384,202,500	-	182,684,569
9	BP3 Curug	-	93,000,000	-	-	93,000,000
		-				-
	Sub Jumlah C	**863,172,748**	**2,084,920,407**	**524,117,858**	**789,397,748**	**1,634,577,549**
D.	**PIUTANG JANGKA PANJANG**					
1	PPSDM Perhubungan Darat	184,000,000	-	-	26,000,000	158,000,000
	Sub Jumlah D	**184,000,000**	**-**	**-**	**26,000,000**	**158,000,000**

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SUGIHARDJO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

Daftar Piutang Negara Yang Diserahkan ke PUPN
Unit Eselon I : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
per 31 Desember 2019

Klassifikasi Piutang	Unit Pengelola	Debitor		Mata Uang	Saldo Awal 1 Januari 2015	Penyerahan ke KPKNL			Pembayaran	Saldo 31 Desember 2015	Tahap Pengurusan Terakhir	Keterangan
		Nama	Alamat			KPKNL	No. & Tgl Surat	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
I. PNBP	-	-	-			-	-	-	-	-		
Sub Jumlah I												
II. Piutang Lainnya	-	-	-			-	-	-	-	-		
Sub Jumlah II												
Jumlah Total (I+II)								-	-	-		

JAKARTA, 2020
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SUGIHARDJO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001